

**PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB
RABA BIMA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima)**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

OLEH :
Dhita Mita Ningsih
NIM : 10500113231

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana", yang disusun oleh saudara **Dhita Mira Ningsih**, Nim. 10500113231, Mahasiswa program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Juli 2017 M, bertepatan dengan 3 Zulqaidah 1438 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan

Samata, 2 Agustus 2017
9 Zulqaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H, M.H	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. Achmad Abubakar, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Dr. M. Thahir Maloko, M. Hi	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hamzah Hasan, M.Hi	(.....)
Pembimbing II	: Rahman Syamsuddin, SH, MH	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP: 19621016 199003 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhita Mita Ningsih
NIM : 10500113231
Tempat/Tgl.Lahir : Bima, 10 Agustus 1996
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. H. Sahrul Yasin Limpo, Gowa.
Judul : Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB
Raba Bima Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus RUTAN Bima)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 31 Mei 2017

Penyusun,

Dhita Mita Ningsih

NIM: 10500113231

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين , وعلى اله وصحبه
اجمعين. اما بعد

Rasa syukur yang sangat mendalam penyusun panjatkan kehadirat Allah swt. atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Rutan Bima)” sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad Saw. yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Saya menyadari bahwa, tidaklah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih yang teristimewa untuk kedua orang tua saya Ayahanda tercinta Gufran Abidin dan Ibunda tercinta Junari H. Ismail yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril dan materil, mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta kasih sayang, serta adik saya Deti Putri Ratna Suminar atas semua perhatian dan kasih sayangnya. Ucapan terima kasih juga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag, selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan pengembangan lembaga Bapak Dr. Hamsir, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dr. H. M. Saleh

- Ridwan, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Segenap Pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Teruntuk Ibu Istiqamah, SH., MH. dan Bapak Rahman Syamsuddin, SH., MH. selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, nasehat, motivasi demi kemajuan penyusun.
 4. Teruntuk Bapak Dr. Hamzah Hasan., M.HI dan bapak Rahman Syamsuddin SH., M.H Selaku pembimbing skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi demi kemajuan penyusun.
 5. Teruntuk Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar terkhusus Ibu Hera, Pak Rais dan Pak Amiruddin yang telah memberikan ilmu, membimbing penyusun dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penyusun dalam penulisan skripsi ini dan semoga penyusun dapat amalkan dalam kehidupan di masa depan.
 6. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Hukum terkhusus Angkatan 2013 “MEDIATOR” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
 7. Kepada Sahabat-sahabat saya yang tersayang Musfaidah, Ultry Maisari, Irma, Nurjanni, Sulaiman Nun, Ilham Syaptura yang telah memberikan doa, semangat, dan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuannya kepada saya selama penyusunan skripsi ini.
 8. Sahabat-sahabat saya di kampus, Eka Syamsur, Rezky Amaliah, Ahmad Alka, Astri Isnaeni, Mardas, Farida Tahir, Nurannisa Anas, Muh Cakra Romokoy, Muh. Fachrizal Alamsyah, Nur Aulia Sari, Adrian Siregar, Nurjannah, Mirna Wahyuni, Amiruddin dan teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum “E” yang telah

memberikan semangat dan bantuannya kepada saya selama penyusunan skripsi ini.

9. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penyusun dalam penyusunan penulisan skripsi ini baik secara materil maupun moril.

Penyusun menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Samata, 12 Mei 2017

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Dhita Mita Ningsih
NIM: 10500113231

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ا	ad		Es (dengan titik dibawah)
د	ad		de (dengan titik dibawah)
ط	a		te(dengan titik dibawah)
ظ	a		zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain		apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fat ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	ammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fat ah dan y	Ai	a dan i
اَوْ	fat ah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... / ي...	Fat ah dan alif atau y		a dan garis di atas
ي	Kasrah dan y		i dan garis di atas
و	ammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

: m ta

: ram

قيل : q la

يموت : yam tu

4. *T marb ah*

Transliterasi untuk *t ' marb ah* ada dua yaitu: *t ' marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *t ' marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t* ' marb ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t* ' marb ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: rau ah al-a f l

المدينة الفا ضلة : al-mad nah al-f ilah

: rau ah al-a f l

5. *Syaddah (Tasyd d)*

Syaddah atau tasyd d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyd d (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

: rabban

نجينا : najjain

: al- aqq

: nu"ima

: 'duwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi .

Contoh:

: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

: 'Arab (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalزال (az-zalزال)

: al-falsafah

: al-bil du

7. *Hamzah.*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

: ta'mur na

: al-nau'

: syai'un

: umirtu

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur' n), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

F il l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

9. *Laf al-jal lah* ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mu ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله d null h bill h

Adapun *t' marb* ah di akhir kata yang disandarkan kepada laf al-jal lah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

في رحمة اللهم hum f ra matill h

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla bi bakkata mub rakan

Syahru Rama n al-la unzila fih al-Qur' n

Na r al-D n al- s

Ab Na r al-Far b

Al-Gaz l

Al-Munqi min al- al l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Ab al-Wal d Mu ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Ab al-Wal d Mu ammad (bukan: Rusyd, Ab al-Wal d Mu ammad Ibnu)

Na r mid Ab Za d, ditulis menjadi: Ab Za d, Na r mid (bukan:
Za d, Na r mid Ab).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

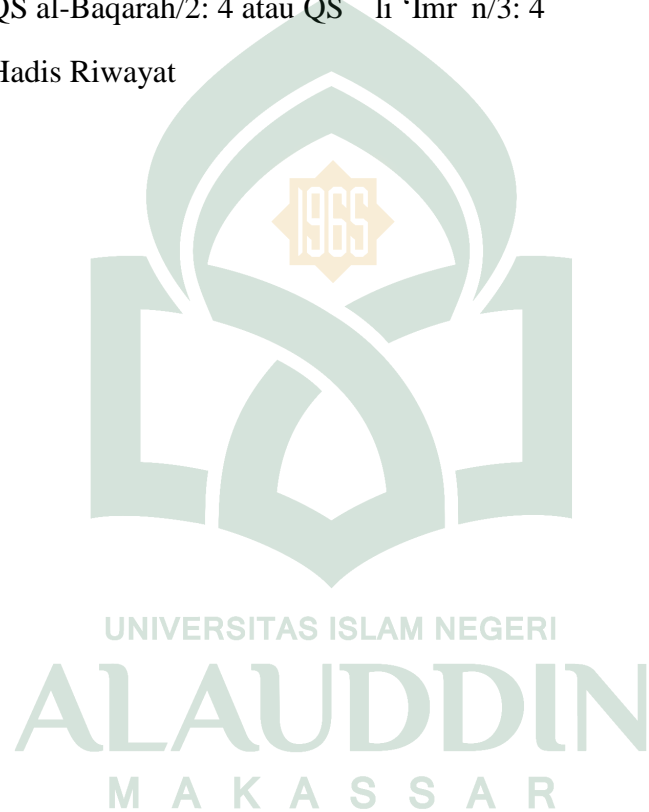
swt. : sub nah wa ta' l

saw. : allal hu 'alaihi wa sallam

M : Masehi

QS.../...: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS li 'Imr n/3: 4

HR : Hadis Riwayat



Nama : Dhita Mita Ningsih

NIM : 10500113231

**Judul : PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA
KLAS IIB RABA BIMA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN
TINDAK PIDANA (STUDI KASUS RUTAN KLAS IIB RABA
BIMABIMA)**

ABSTRAK

Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu bagaimana Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana. Kemudian dijabarkan kedalam submasalah yaitu bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana untuk mencegah pengulangan tindak pidana. dan hambatan-hambatan apa dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima Guna Mencegah Pengulangan Tindak pidana dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Field Research* kualitatif. Penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara terhadap petugas Rutan dalam membina warga binaan. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima tidak berjalan dengan maksimal dan terjadi kendala yang tidak begitu serius hanya saja kendala yang terjadi di dalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima yaitu sumber daya manusia yang tidak memadai, banyaknya peralatan atau fasilitas yang rusak, dan kurangnya petugas Rutan dalam bidang pembinaan serta sosialisasi kepada masyarakat agar dapat merubah stigma terhadap warga binaan pemasyarakatan, sehingga mantan narapidana dapat diterima kembali di masyarakat.

Peneliti berharap agar selama pelaksanaan pembinaan narapidana tercukupi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sumbangan dana dari pemerintah juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, memperbaiki segala peralatan yang rusak dan penambahan petugas pembinaan narapidana agar pelaksanaan pembinaan bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-9
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10-56
A. Pembinaan Narapidana.....	10
B. Pengertian Rumah Tahanan Negara	17
C. Usaha Memperbaiki Kehidupan di Rumah Tahanan Negara	19
D. Hukum Pidana Islam dan Pembinaan Narapidana	22
E. Jenis-jenis Hukuman Dalam Pasal 10.....	42
F. Pelanggaran dan Kejahatan dalam Hukum Pidana (Hukum Positif).....	50
G. Jenis-jenis Pembinaan dalam Rumah Tahanan Negara	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	57-61
A. Jenis Penelitian.....	57

B. Lokasi Penelitian	57
C. Pendekatan Penelitian.....	57
D. Metode Pengumpulan Data	58
E. Instrumen Penelitian	59
F. Sumber Data.....	59
G. Analisis Data	61
H. Penguji Keabsahan Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62-79
A. Sejarah dan Latar Belakang Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima.....	62
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana.....	71
C. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana	80
BAB V PENUTUP.....	84-85
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
C. Daftar Informan.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87-90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembinaan narapidana ini di Indonesia diterapkan dengan sistem yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengenai sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.¹

Apa yang dewasa ini disebut sebagai lembaga pemasyarakatan sebenarnya ialah salah satu lembaga, yang dahulu juga di kenal sebagai rumah penjara, yakni dimana tempat orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.

Perkataan pemasyarakatan itu sendiri, untuk pertama kalinya telah diucapkan oleh Sahardjo, di dalam pidato penerimaan gelar doktor honoris causa beliau dalam

¹Aris Irawan, “*Proposal Penelitian Efektifitas Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bbiaro (Studi Keberadaan Mantan Narapidan di Masyarakat)*”, Blog Aris Irawan, <https://arisirawan.wordpress.com/2010/09/08/penelitian-tentang-pembinaan-narapidana> (20 November 2016).

ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 juli 1963, yakni di dalam pidato mana beliau antara lain telah mengemukakan rumusan tentang tujuan dari pidana penjara, yakni di samping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu ialah pemasyarakatan².

Walaupun telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara itu suatu pemasyarakatan, dan walaupun sebutan dari rumah-rumah penjara itu telah diganti dengan sebutan lembaga-lembaga pemasyarakatan, akan tetapi dalam praktik ternyata gagasan tersebut tidak didukung oleh suatu konsepsi yang jelas dan sarana-sarana yang memadai, bahkan peraturan-peraturan yang dewasa ini digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pemasyarakatan itu, masih tetap merupakan peraturan-peraturan yang dahulu kala telah dipakai orang sebagai pedoman untuk melaksanakan hukuman-hukuman di dalam penjara.

Walaupun orang belum mampu membuat suatu peraturan yang baru untuk menggantikan Ordonansi tanggal 10 Desember 1917 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 708 yang juga dikenal dengan sebutan *Gestichtenreglement*, yakni peraturan yang hingga kini masih di pakai sebagai dasar untuk melakukan pemasyarakatan di lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia, akan tetapi orang patut memberikan penghargaan pada usaha Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, yang telah berusaha menyesuaikan perlakuan terhadap narapidana di lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia dengan tujuan pemasyarakatan. Untuk maksud tersebut oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM telah

²Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 165.

diterbitkan suatu petunjuk pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam lembaga, yang disebutkan manual pemasyarakatan³.

Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Hukum pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada seseorang yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut⁴.

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum public tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektif dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat⁵.

³Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. h. 165.

⁴Octavia Sri Handayani, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Recidive Di Lapas Kelas II Asragen" 2010.

⁵Ardy, "Tujuan Hukum Pidana" <https://tanahberu2.wordpress.com/2010/10/11/tujuan-hukum-pidana> (20 November 2016).

Nyatalah bahwa hukum pidana (Materiel) sebagai substansi yang dijalankan dengan kata-kata karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Moeljatno, seorang ahli sarjana hukum pidana Indonesia bahwa hukum pidana Formil adalah hukum pidana sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilarang atau di lakukan dengan tidak di sertai larangan atau sanksi bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa pada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Semua ini dilakukan bawasanya narapidana merupakan masyarakat dari bangsa Indonesia sendiri yang mempunyai hak-hak yang patut dipenuhi, diantaranya hak untuk hidup hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman.

Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana hendaknya dapat diberikan dengan jalan adanya pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian

⁶Andi Hamza, "Asas-asas Hukum Pidana" <http://andruhk.blogspot.co.id/2012/07/asas-asas-hukum-pidana.html> (21 November 2016).

diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar nantinya narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Perkembangan tujuan pembinaan narapida berkaitan erat dengan tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

- a. Setelah keluar dari Lapas tidak lagi melakukan pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun Bangsa dan Negara
- c. Mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa dan mendekatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat

Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada kenyataannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh dimasyarakat. Dalam hal ini yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat hidup yang tumbuh dimasyarakat maksudnya dalam pembinaan narapidana para petugas pembina narapidana terkadang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku seperti yang diamanahkan pada Pasal 14 ayat (1) UU pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana dan dalam ketentuan PP No.31/1999 tentang pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, merupakan dasar bagaimana seharusnya narapidana diberlakukan dengan manusiawi dalam satu sistem pemidanaan yang terpadu.

Pembinaan yang diberikan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bima masih berada jauh dibawah standarisasi nasional, masih banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan yang terbesar.

Sebagai contohnya adalah peristiwa yang dilakukan oleh narapidana hingga berujung pada pembakaran sejumlah fasilitas Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2012.

Kerusuhan yang diwarnai aksi pembakaran tersebut bermula dari peristiwa penusukan pada narapidana yang dilakukan oleh narapidana lain terkait adanya perlakuan khusus atau sikap diskriminasi oleh petugas Pemasyarakatan yang dianggap tidak adil.

Sementara itu, faktor internal terkait dengan terjadinya kerusuhan terbaik dikarenakan terbatasnya jumlah petugas keamanan dan Pemasyarakatan, minimnya Sumber Daya Manusia petugas Pemasyarakatan dan kurangnya pemahaman dari petugas Pemasyarakatan terhadap P.P.L.P (Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan) yang wajib dibawa dan dipahami ketika melakukan pengawasan terhadap narapidana.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bagaimana cara pembinaan narapidana dilembaga pemasyarakatan guna mencegah pengulangan tindak pidana, penelitian ini juga peneliti akan mengkaji bagaimana cara sipir membina narapidana untuk membentuk suatu karakter yang baik dimasyarakat, agar nanti tidak melakukan pengulangan kejahatan.

2. Deskripsi Fokus

Pembinaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah suatu usaha untuk pembinaan kepribadian yang mandiri dan sempurna serta dapat bertanggungjawab,

atau suatu usaha, pengaruh, perlindungan dalam bantuan yang di berikan kepada anak yang tertuju kepada kedewasaan anak itu, atau lebih cepat untuk membantu anak agar cakap dalam melaksanakan tugas hidup sendiri, pengaruh itu datangnya dari orang dewasa (diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku pintar hidup sehari-hari, bimbingan dan nasehat yang memotivasinya agar giat belajar), serta di tujukan kepada orang yang belum dewasa.

Pengertian narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); atau terhukum.

Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (*Pasal 1 Angka 3 UU RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*). Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana?
2. Hambatan-hambatan apa dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana
- b. Mengetahui hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana

2. Kegunaan Hasil Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, Untuk memperkaya keilmuan peneliti dalam bidang hukum yang berkaitan dengan hukum pidana.
- b. Kegunaan Praktis, Dapat dijadikan pertimbangan untuk masyarakat mengetahui pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan guna mencegah pengulangan tindak pidana.
- c. Dapat digunakan sebagai salah satu referensi mahasiswa dalam penelitian.

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian mengenai Tinjauan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan guna mencegah pengulangan tindak pidana., peneliti menemukan referensi yang berkaitan dan menjadi bahan perbandingan sekaligus pedoman dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pertama, buku yang berjudul “Hukum Penitensier” P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang. Yang membahas tentang pengertian Hukum Penitensier, Pidana dan Pemidanaan, Tindakan dan kebijaksanaan .⁷

⁷Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 291.

2. Kedua, buku yang berjudul "Hukum Pidana Islam" Zainuddin Ali. Yang membahas tentang sumber, unsur, dan ciri-ciri hukum pidana Islam, perbuatan membunuh, perbuatan mencuri, penodong, perampok, penipu dan korupsi.⁸
3. Ketiga, skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)" yang di selesaikan pada Tahun 2010 oleh OCTAVIA SRI HANDAYANI. Dalam skripsinya membahas mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana, dalam skripsi ini juga kebanyakan mengambil ruang lingkup, teori dan dasar hukum tentang pelaksanaan pembinaan narapidana, sedangkan dalam penelitian kali ini, peneliti tidak hanya meneliti dari segi pelaksanaan pembinaan narapidana akan tetapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana.⁹
4. Jurnal Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan.
 Dalam jurnal ini membahas mengenai segala bentuk pembinaan dan segala masalah yang terjadi di dalam Lapas, baik mengenai Napi yang kabur dari Lapas, daftar pemilik sel mewah di Lapas, Lapas kelebihan kapasitas. Jurnal ini tidak hanya membahas tentang kriminalitas yang tinggi ada juga hal unik yang terjadi di dalam Lapas seperti ada Al-Qur'an raksasa buatan Narapidana, Ratusan Napi ikutan khataman Qur'an

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. (jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 15. 139.

⁹Oktavia Sri Handayani, *Pelaksanaan Pimbinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pdana Recidive* (Sragen: Skripsi, 2010), h. 64.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Pembinaan Narapidana

Menurut ketentuan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang pola pembinaan narapidana/tahanan. Menyatakan pengertian pembinaan adalah pembinaan meliputi tahanan. Pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien.

1. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
2. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan
3. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien Pemasyarakatan diluar tembok.¹

Ditinjau dari segi bahasa, pembinaan diartikan sebagai proses, cara, pembuatan membina, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 655).²

¹Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04.10,Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, <http://www.Departemen Hukum dan Ham.co.id>

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka 2001), h. 655.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah bentuk corak, model kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna memperoleh hasil yang baik.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar:

- 1) Umur
- 2) Jenis kelamin
- 3) Lama pidana yang dilakukan
- 4) Jenis kejahatan dan
- 5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.³

Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, menyatakan bahwa dasar pemikiran pembinaan narapidana tertuang dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, ucapan, cara penempatan ataupun penetapan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana adalah hanya di batasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.

³Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan

3. Berikan bimbingan supaya mereka bertobat, berikan kepada mereka pengertian tentang norma-norma hidup dan kegiatan sosial untuk mrenumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergerakanya para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi peluang jabatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana adalah berdasarkan pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus dinamakan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.
8. Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri keluarga dan lingkungan, kemudian di bina dan di bimbing kejalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harga diri akan tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu.

10. Untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana maka disediakan sarana yang diperlukan.⁴

Kebutuhan akan pedoman-pedoman berlaku yang akan dapat memberikan pegangan bagi manusia, antara lain. Menimbulkan norma atau kaedah. Norma atau kaedah tersebut. Dari sudut hakekatnya merupakan suatu pandangan menilai terhadap perilaku manusia. Dengan demikian, maka suatu norma atau kaedah merupakan patokan. Patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas. Adanya peraturan-peraturan hukum yang harus di patuhi penguasa yang membuat hukum tidak bermaksud untuk menyusun peraturan-peraturan untuk dilanggar oleh karena peraturan-peraturan hukum yang dibuat adalah dengan tujuan untuk memecahkan problema-promblema yang terjadi dan bukan untuk menambah jumlah problema yang sudah ada di masyarakat.

Untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, dalam hukum positif kita diatur perbuatan-perbuatan yang digolongkan kedalam pelanggaran dan kejahatan.⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

⁴Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04.10,Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, <http://www.Departemen Hukum dan Ham.co.id>

⁵Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Cetakan pertama. (yogyakarta: Graha Ilmu 2010), h. 70-72

5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlakunya.⁶

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi. Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui HAM komitmen terhadap perlindungan/pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara

⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996 (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik), Declaration on Protection From Torture 1975 (Deklarasi Perlindungan dan Penyiksaan dan Perlakuan atau Pidana lain yang Kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusiawi), Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner 1957 (peraturan standar minimum untuk perlakuan napi yang menjalani pidana).

Pada tahap pelaksanaan putusan HAM yang di inrodusir menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus di dasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar-pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang-orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.

Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman (Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), yang meliputi:

- a. Buku register;
- b. Pemisahan kategori Napi;

- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g. Makanan yang sehat;
- h. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- k. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- r. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.⁷

Dari apa yang tertulis diatas, dapat di lihat bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh PBB tentang Perlindungan HAM Napi yang masih sangat mungkin untuk di adopsi ke dalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia.

⁷<http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-narapidana-dan-hak-hak.html>

B. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Didalam rumah tahanan negara ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Rumah Tahanan Negara dikelola oleh Departemen Kehakiman. Selanjutnya Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksanaan teknis dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Penghuni Rumah Tahanan Negara bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penghuni suatu lembaga pemasyarakatan atau orang-orang tahanan itu terdiri dari:

1. Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan;
2. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara;
3. Orang-orang yang disandera.
4. Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, akan tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu ialah :

- a. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan;
- b. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan;
- c. Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat;
- d. Mereka yang dikenakan pidana kurungan;
- e. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.⁸

Menurut (Yuliati dkk, 2003) jenis-jenis lembaga pemasyarakatan dibagi atas berbagai tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan yaitu :

- 1) Dari sudut perkembangannya kelembagaan terdiri dari Criscive Institution and Enacted Institution. Yang pertama merupakan lembaga yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Sementara yang kedua dilahirkan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- 2) Dari sudut sistem nilai kelembagaan masyarakat dibagi menjadi dua yakni Basic institution and Subsidiary Institution. Yang pertama merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam mempertahankan tata tertib masyarakat sementara yang kedua kurang penting karena hanya jadi pelengkap.
- 3) Dari sudut penerimaan masyarakat, terdiri dari dua yaitu Sanctioned Institution and unsanctioned Institution. Yang pertama merupakan

⁸Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan

kelompok yang dikehendaki seperti sekolah dll, sementara yang kedua ditolak meski kehadirannya akan selalu ada. Lembaga ini berupa pesantren sekolah, lembaga ekonomi lain dan juga lembaga kejahatan.

- 4) Dari sudut faktor penyebabnya dibedakan atas General institutional and Restriktic Institutional. Yang pertama merupakan organisasi yang umum dan dikenal seluruh masyarakat contoh agama, sementara yang kedua merupakan bagian dari institusi yakni Islam, Kristen, dan agama lainnya.
- 5) Dari sudut fungsinya dibedakan atas dua yaitu Operatif Institutional and regulatif Institutional. Yang pertama berfungsi untuk mencapai tujuan, sementara yang kedua untuk mengawasi tata kelakuan nilai yang ada di masyarakat.⁹

C. Usaha Memperbaiki Kehidupan di Dalam Rumah Tahanan Negara

Pasal 23 KUHP telah menentukan bahwa orang yang di pidana dengan pidana kurungan atas biaya sendiri dapat mengusahakan perbaikan bagi kehidupannya, sesuai dengan peraturan yang ada dalam ordonansi.

Peraturan tersebut ternyata terdapat di dalam Bab ke-XIII dari ordonansi tanggal 10 Desember 1917, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 708 yang juga dikenal sebagai *Gestichtenreglement*.

Pasal 93 ayat (1) dari *Gestichtenreglement* selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kunnen de gezizelden, devoorlopig aangehoudenenen detot hectenis veroordeelden, desverkiezende, voor eigen rekening in voeding en ligging voorzien en ziech alles verschaffen,

⁹<http://info-peternakan.blogspot.co.id/2012/10/jenis-dan-fungsi-lembaga-kemasyarakatan.html>

wa tot verzachting van hun lot kan strekken. (Dengan memperhatikan ketentuan dari peraturan ini, atas biaya sendiri orang-orang yang disandera, orang-orang yang dikenakan penahanan sementara dan orang-orang yang dipidana dengan pidana kurungan, apabila mereka menghendaki dapat mengusahakan makanan, alat-alat tidur, dan lain-lain, yang kiranya dapat meringankan penderitaan mereka).¹⁰

Ketentuan yang sifatnya menguntungkan bagi orang-orang yang dikenakan penahanan sementara, ternyata tidak dijumpai di dalam ketentuan yang mengatur masalah Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Apalagi ketentuan seperti yang telah diatur dalam Pasal 93 ayat (2) dari *Gestichtenreglement*, yang berbunyi sebagai berikut ini.

Aan de gegijzelden voorloping aan aangehoudenen wordt bovendien alles vergund, watme deordein degevangenis, hunne bewaking ende bepalingen ven het huishoudelijk reglement dergevangneis, waaring zijzijn opgenomen, niet onverenigbaar is. (Kecuali dari itu kepada orang-orang yang di sandera dan kepada orang-orang yang dikenakan penahanan sementara dapat di izinkan untuk mendapatkan apa saja, sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban, dengan penjagaan terhadap diri mereka dengan ketentuan-ketentuan di dalam aturan rumah tangga lembaga dari lembaga permasyarakatan di mana mereka ditutup).¹¹

Apakah dengan demikian usaha untuk mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi bagi orang-orang yang dikenakan penahanan sementara atau setidaknya tidaknya yang mempunyai sifat yang sama dengan perlakuan yang di kehendaki oleh Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) dari *Gestichtenreglement* kemungkinannya sudah menjadi tertutup bagi kita di dalam era KUHAP yang katanya ingin melindungi hak asasi manusia dan ingin mengatur perlindungan bagi harkat dan martabat manusia?

¹⁰Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, h. 257.

¹¹Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, h. 258.

Ternyata di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana masih terdapat sedikit celah yang dapat di manfaatkan untuk menciptakan ketentuan yang lebih manusiawi dari ketentuan yang terdapat di dalam pasal 93 ayat 1 dan ayat 2 dari *Gestichtenreglement* yang apabila kesempatan terakhir itu ternyata telah tidak dapat di manfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Pembentukan KUHAP dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya secara nyata merupakan suatu kemunduran bagi perlakuan terhadap orang-orang yang dikenakan penahanan sementara, baik yang dilakukan oleh para penyidik maupun yang dilakukan oleh para penuntut umum.

Celah sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah ketentuan yang telah diatur di dalam pasal 23 ayat (1) dan peraturan pemerintah No 27 tahun 19983 yang mengatakan, bahwa kepala RUTAN mengatur tata tertib RUTAN berdasarkan pedoman yang di tentukan oleh Menteri.

Walaupun hanya sekedar suatu pedoman, tetapi pedoman yang akan dibuat oleh Menteri Hukum dan HAM mempunyai arti yang sangat besar bagi adanya suatu perlakuan yang lebih manusiawi terhadap orang-orang yang dikenakan penahanan sementara di negara hukum Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, hingga wajarlah apabila perlakuan terhadap orang-orang yang dikenakan penahanan sementara pada khususnya, dan perlakuan terhadap orang-orang tahanan pada umumnya di Indonesia itu haruslah lebih baik dari perlakuan yang dapat mereka peroleh di negara yang manapun di dunia.¹²

¹²Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, h. 259.

D. *Hukum Pidana Islam dan Pembinaan Narapidana*

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis.¹³ Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Al-Qur'an merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut *al-Bayan* (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satu di antaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun bagi pelaku yang bersifat janda atau sudah menikah hukumannya adalah rajam.

¹³Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), h. 86

Asas-asas Hukum Islam

Asas mempunyai beberapa pengertian. Salah satu di antaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, juga berarti alas atau landasan. Alas kata berarti bukti untuk menguatkan suatu keterangan.¹⁴ Oleh karena itu, bila kata “asas” dihubungkan dengan kata “hukum” sehingga menjadi asas hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Hal itu berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Asas hukum pidana. Asas hukum yang sempat dibicarakan disini alah sebagai berikut:

Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, di antaranya:

a. *Asas Legalitas*

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.

Asas ini berdasarkan al-Qur'an Surah al-Isra'/17: 15 ; dan Surah al-An'am/6: 19 ;

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ
وَازِرَةً وَّزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

¹⁴H. Moh. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 112

Terjemahnya:

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.¹⁵

قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا
الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً
أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. dan al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Qur'an (kepadanya). Apakah Sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui." Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)".¹⁶

Kedua ayat yang di ungkapkan tersebut, mengandung makna bahwa al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak al-Qur'an diturunkan oleh Allah Swt. Kepada Nabi Muhammad Saw.

¹⁵Kementrian Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I: Bandung: PT. Syamil Qur'an, 2012, h. 283

¹⁶Kementrian Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 130

b. *Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain*

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat pada dalam Surah al-Muddassir/74: 38 ;

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”.¹⁷

c. *Asas Praduga Tak Bersalah*

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak betrsalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini di ambil dari ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.¹⁸

Hukum syara' menurut ulama ushul ialah (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqih hukum syara ialah efek yang di kehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah syariat menuntut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi, baik hukum

¹⁷Kementrian Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 578

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 7

yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.

Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadanya di dalam perhubungan dengan tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.¹⁹

Menurut Muhammad Ali At-Tahanawi dalam kitabnya Kisyaaf Ishthilaahaat al-Funun memberikan pengertian syari'ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah. Ibadah akhlaq dan muamallah (kemasyarakatan). Syari'ah disebut juga syara', millah dan diin.

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib ditunjuk (di taati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syari'at meliputi:

1. Ilmu Aqid (Keimanan)
2. Ilmu Fiqih (Pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
3. Ilmu Akhlaq (Kesusilaan).²⁰

Berdasarkan uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (Aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Hukum Islam adalah peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan, bertujuan untuk menciptakan masyarakatan yang madani, aman, nyaman dan terkendali hukum dibuat

¹⁹<http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>

²⁰<http://www.suduthukum.com/2017/07/pengertian-hukum-islam.html>

sebagai pembatas atas tingkah laku manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga perlu media untuk melindungi orang lain dari orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Hukum Islam hukum bisa berdasarkan atas kesepakatan adat, ketetapan daerah ataupun ketetapan agama. Salah satu hukum yang berafiliasi adalah hukum yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman yang dibentuk dari sumber dalil-dalil agama Islam. Hukum itu bisa berarti ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan dan sebagainya. Hukum Islam hanya ditujukan kepada orang-orang yang beragama Islam dan tidak ditujukan kepada orang yang non-Islam. Jika ada orang islam yang melanggar hukum Islam orang itu harus diadili sesuai dengan ketentuan dalil-dalil agama Islam, ada beberapa sumber yang menjadi landasan dalam membuat ketetapan hukum Islam. Sumber-sumber tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam. Kitab tersebut diturunkan kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikar jibril. al-Qur'an memuat banyak sekali kandungan. Kandungan-kandungan tersebut berisi perintah, larangan, anjuran, ketentuan dan sebagainya. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang madani. Maka dari itu ayat-ayat al-qur'an inilah yang menjadi landasan-landasan utama untuk menetapkan suatu hukuman.

2. Hadis

Hadis adalah segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, dan sifat beliau. Hadis menjadi landasan sumber yang paling kuat setelah al-Qur'an. Nabi Muhammad menjadi sosok yang paling sentral bagi umat Islam karena umat Islam meyakini bahwa segala

perbuatan Rasulullah tidak sedikitpun yang bertentangan dengan al-Qur'an dan beliau terbebas dari kesalahan.

3. Ijma (Ulama Ijma)

Ulama adalah kesepakatan ulama yang mengambil simpulan berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an atau hadis. Para ulama mengambil ijma karena dalam al-Qur'an ataupun hadis tidak dijelaskan secara terperinci sebuah ketetapan yang terjadi masa itu atau kini. Dengan demikian para ulama mengadakan rapat dan membuat kesepakatan tersebut menjadi ketetapan hukum. Ijma ulama tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an ataupun hadis.

4. Qiyas

Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam al-Qur'an ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Misalnya, dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa segala sesuatu yang memabukan adalah haram hukumnya. Al-Qur'an tidak menjelaskan bahwa arak haram, sedangkan arak adalah sesuatu yang memabukkan dengan demikian kita akan mengambil qiyas bahwa arak haram hukumnya karena memabukkan.²¹

Al-Qur'an mengatur hukum yang berkaitan dengan kepercayaan dan ibadah kepada Allah yang bersifat vertikal dan hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi kemanusiaan yang bersifat horizontal. Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi ide dasar lahirnya hukum dan peraturan yang berhubungan

²¹<https://www.scribd.com/document/127260387/Pengertian-Hukum-Islam>

dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk persoalan yang memerlukan ijtihad para ulama.

Firman Allah menyatakan bahwa al-Qur'an sumber utama bagi ketentuan hukum. QS. Al-Nisa/4: 105 ;

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.²²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan sebuah kitab yaitu al-Qur'an yang di dalamnya mengandung kebenaran (hukum) untuk mengadili manusia yang melakukan kejahatan dan melarang manusia untuk menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an terdiri atas ayat-ayat yang memerintah, melarang, menganjurkan, dan memberikan pilihan untuk umat manusia.²³

²²Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, h. 125

²³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika 2012). h. 15.

Qishash

Qishash ialah persamaan dan perseimbangan antara tindak pidana dengan sanksi pidana atau memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya.²⁴ Secara kebahasaan, *qishash* merupakan kata turunan dari *qasasa- yaqusu- qassan wa qasasan* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas.²⁵ Qishash berasal dari kata *qassa* yang berarti memotong, juga berasal dari kata *aqtassa* yang berarti mengikuti, yakni mengikuti perbuatan dilakukan oleh para pelaku tindak pidana untuk pembalasan dengan jenis dan ukuran yang sama dari tindak pidana itu. Sementara menurut Qaljabi memahami qishash dengan hukum bunuh atau *qawad*.²⁶

Sedangkan menurut al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban.²⁷ *Al-Mu'jam al-Wasit*, menyebutkan, qishash yang dimaksud adalah menjatuhkan hukuman pelaku tindak pidana mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa, anggota tubuh dengan anggota tubuh.²⁸ Qishash adalah pembalasan untuk pelaku kejahatan setimpal dengan kejahatannya.²⁹ Pidana mati ini disebut qishash karena

²⁴Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim* (Jakarta: Kholam Publising, 2008), h. 128

²⁵Ibrahim Anis dkk., *Al-Mu'jam al-Wasit*, Juz II (Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1972), h. 739-740

²⁶Qajubi dalam Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 275

²⁷Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Jakarta: Dar al-Hikamh, t.th), h. 176

²⁸Ibrahim Anis, dkk., *al-Mu'jam al Wasit*, Juz II, h. 70

²⁹Abdurrahman Madjri dan Fauzan al-Anshari, *Qishash Pembalasan yang Hak* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. 10

pidana ini sama dengan tindak pidana yang dilakukan yang mengakibatkan qishash tersebut, seperti membunuh dibalas dengan membunuh dan memotong kaki dibalas dengan pemotongan kaki pelaku tindak pidana tersebut.

Pidana qishash itu adalah pidana yang pernah berlaku sebelum Islam, yaitu berlaku pada umat syariat Yahudi.³⁰ Yang ditunjuk dengan kata sebelum kamu, hal tersebut dapat dilihat pada Qs al-Maidah/5: 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ^{٤٥} وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Terjemahnya:

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.³¹

³⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuhu*, Juz VI (Damsyiq: Dar al-al-Fiqh, 1989), h. 218

³¹Kementrian Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115

Menurut Shalih bin Fauzan mendefinisikan qishash adalah perbuatan (pembalasan) korban atau walinya terhadap pelaku kejahatan sama atau seperti perbuatan pelaku. Al-Qur'an sendiri memberi isyarat bahwa yang di maksud dengan qishash adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Di dalam al-Qur'an kata qishash disebutkan empat kali dan semuanya dalam bentuk (kata benda). Dua di antaranya *ism ma'rifah* (kata benda defenitif). dengan alif dan lam dan dua yang lain *ism nakirah* (kata benda idenfinitif). Dengan demikian qishash akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah dilakukannya.³² Berdasarkan pengertian tersebut, maka hukum qishash pada dasarnya ada dua macam. *Pertama*, qishash terhadap jiwa, yakni hukum bunuh atau hukuman *qawad* untuk tindak pidana pembunuhan sengaja, *kedua*, hukuman qishash untuk anggota badan yang terpotong ataupun yang dilukai untuk penganiayaan sengaja.

Hukuman qishash itu wajib atas orang yang melakukan pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja ketika pihak keluarga korban atau korban tidak memberikan pengampunan. Ketentuan hukum mengenai qishash jiwa terdapat dalam al-Qur'an. Qs al-Baqarah/2: 178;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

³²Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, h. 275

وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ

ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.³³

Ayat ini menurut Ibnu Abbas sebagai penetapan dari Allah kepada kaum mukmin dengan adanya pilihan antara qishash dan diat, ketika pihak keluarga korban memaafkan. Berbeda dengan apa yang telah ditetapkan pada Bani Israil. Di mana tidak ada bagi mereka, yang ada hanya hukuman qishash.³⁴

Seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, karena identitas iman itu memiliki konsekuensi bahwa yang bersangkutan akan mau menerima segala sesuatu yang datang dari Allah. Mereka beriman kepada Allah tentang di syariatkan qishash itu kepada orang-orang yang dibunuh.

Ayat tersebut berbicara tentang konsep hukuman qishash pelaku kejahatan pembunuhan dengan sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban memaafkan pelaku, maka sanksi qishash tidak berlaku dan berpindah ke hukuman diat. Ayat ini juga berbicara tentang implikasi dari

³³Kementrian Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 27.

³⁴Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah* (Jakarta: Mghfirah Pustaka, 2009), h. 27

pembunuhan sengaja yang merupakan perbuatan haram dan berakibat pada hukuman duniawi dan ukhrawi. Di dunia dia dihukum dengan hukuman qishash dan di akhirat pelaku pembunuhan sengaja mendapatkan balasan disiksa dalam neraka jahannam, dimurkai dan dikutuk oleh Allah. Bahkan menurut Ibnu Katsir membunuh seseorang dengan sengaja merupakan dosa besar yang dalam beberapa ayat al-Qur'an disejajarkan dengan dosa syirik.³⁵

Penggunaan kata *tasaddaqa* pada ayat Qs al-Maidah/5: 45 adalah untuk makna melepaskan hak penuntutan hak qishash dengan mengisyaratkan bahwa pelepasan hak itu, hendaknya dilakukan dengan tulus ikhlas semata-mata karena Allah.³⁶ Pernyataan ini mengandung makna bahwa selain pidana qishash sebagai sanksi yang setimpal dengan perbuatan, juga sangat dianjurkan terjadinya pemaafan dari korban atau keluarganya dan dianggap sebagai sifat terpuji. Jika pemaafan terjadi, maka pelaku dapat dikenai sanksi diat berupa pemberian harta tertentu kepada korban atau keluarganya. Pidana diat ini tidak ada dalam praktik hukum Bani Israil. Pada hal ini membawa kebaikan kepada kedua pihak. Tidak akan terjadi lagi dendam di antara keduanya dan korban berperan aktif dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan.

Ketentuan hukum qishash mengenai jiwa berlaku bagi kejahatan pembunuhan sengaja, sedangkan ketentuan hukum mengenai qishash anggota badan berlaku bagi kejahatan atau delik pelukaan atau pemotongan anggota badan dengan sengaja. Tetapi sanksi pidana ini bisa berubah apabila korban atau keluarga korban memberi pengampunan (maaf) dengan tanpa diat atau dengan kompenisasi diat (ganti

³⁵Al-imam Al-Jalil Al-Hafiz Imaduddin Abu Fida' Ismail Ibn Katsir, *al-Qur'an al-Adzim* (t.tp.: Dar Ilya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.), h. 535

³⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 3 (Jakarta: Lentara Hati, 2002), h. 108

kerugian) berupa pembayaran sejumlah uang atau materi yang dapat di nilai dengan uang. Dalam hal ini terpidana tetap tidak bisa bebas sama sekali dari sanksi pidana, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana takzir.³⁷

Tujuan pemidanaan dalam Islam bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi memiliki tujuan mulia lainnya sebagai *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (*al-tahzib*) bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan tersebut merupakan satu kesatuan utuh dalam penerapan hukum pidana Islam untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan manusia.³⁸

Kejahatan atau tindak pidana terhadap jiwa dan anggota badan merupakan bentuk perlawanan terhadap *maqasid al-syariah*. Dalam hal ini, hukum qishash mengandung aturan-aturan berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan, baik berupa pembunuhan maupun dalam bentuk penganiayaan beserta penanganannya. Pada umumnya pakar hukum Islam menyatukan bahasan qishash dengan *diat*, karena secara lebih luas, tidak semua tindak pidana kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan berujung pada qishash. Bahkan hanya dua dari lima klasifikasi kejahatan tersebut yang dapat divonis qishash, yaitu pada tindak pidana pembunuhan yang disengaja, dan tindak pidana penganiayaan yang disengaja. Sedangkan tiga tindak pidana qishash selainnya, umumnya ulama sependapat hanya dijatuhi hukuman *diat* sesuai ketentuan di dalam hukum pidana Islam, termasuk juga dalam hal ini pembunuhan dan penganiayaan korban sengaja yang dimaafkan keluarga korban.

³⁷Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*, h. 129

³⁸Satria Efendi M. Zein, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini, Mimbar Hukum, Nomor 20 Tahun VI* (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), h. 32

Pidana *qishash-diat* terkandung unsur perlindungan hukum terhadap korban, pelaku tindak pidana, dan masyarakat. Pelaku tindak pidana akan dikenai pidana mati, tetapi hal ini disepakati terlebih dahulu oleh pihak keluarga korban, namun apabila pembunuh atau penganiaya dimaafkan oleh korban maka pelaku akan bebas dari pidana mati tetapi sebagai gantinya dia harus dikenakan pidana *diat*, yang diberikan pada pihak keluarga korban. Hal inilah mengapa penjatuhan pidana *qishash-diat* ada dalam konsep hukum pidana Islam dikatakan lebih manusiawi dan lebih adil.³⁹

Bandingkan jika kasus tersebut digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku divonis 15 sampai 20 tahun penjara, karena pembunuhan direncanakan atau berkomplot. Lalu si pelaku misalnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, disantuni oleh pemerintah seluruh kebutuhannya selama masa hukuman, sementara keluarga korban (istri dan anak-anaknya) akan sengsara hidupnya, karena tidak pernah diajak bicara, atau tidak pernah dimintai pendapatnya oleh pemerintah, maka ketika mereka menjadi susah, tidak kuat lagi membayar kontrakan rumah. Keluarga korban menjadi terlantar tidur di kolong jembatan, dan menjadi anak-anak liar. Sementara ibunya kecewa, putus asa dan tidak menutup kemungkinan si ibu nekad bunuh diri. Akibat lain si anak jadi liar, berandal, jadi preman, penodong, geng motor, begal dan sebagainya, dan tidak tertutup kemungkinan akan dendam.

Keadilan harus menjadi hal pokok ketika berbicara tentang hubungan individu dengan individu lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial, selalu melakukan interaksi dengan manusia lain, artinya tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa keterlibatan manusia lain. Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang dapat menjadi pemangsa

³⁹Edy Sutrisno, "Mengintegrasikan Konsep Qishas-Diat ke dalam Pasal-pasal Pembunuhan dalam Hukum Pidana", dalam <http://library.gunadarma.ac.id>. 12-11-2012

bagi orang lain sehingga masyarakat dengan sistem sosial tertentu harus memberikan aturan pada para anggota yang mengatur tentang hubungan tersebut. Menurut Herbert Spencer, setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukan, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.⁴⁰

Syarat-syarat qishash

Hukuman qishash tidak dapat dilaksanakan, kecuali memenuhi syarat. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Syarat pada pelaku. Menurut Wahbah al-Zuhaili ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana pembunuhan untuk dapat diterapkannya hukuman qishash.⁴¹

- 1) Pelaku harus orang mukallaf, yaitu balik dan berakal. Qishash tidak dapat dilaksanakan terhadap anak yang masih di bawah umur dan orang gila, karena keduanya tidak layak dikenakan hukuman.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud:

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، و عن الصغير حتى يكبر ، و عن المجنون حتى يعقل أو يفيق "

Artinya:

Dari Aisyah ra. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.; “dihapuskan ketentuan hukum daritiga hal : dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dan dari kecil sampai ia dewasa.”⁴²

- 2) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja. Yaitu dengan perbuatannya itu bermaksud menghilangkan nyawa korban, ia tidak

⁴⁰Syariah Consulting Centre, “Hukum Pidana Islam Kejam, dalam www.syariahonline.com

⁴¹Wahbah al- Zauhili, *al-Fiqh Al-Islami wa ‘Adillahtuhu*, Juz VI (Cet. III, Damsiq: Darul Fikr, 1989 M.), h. 265

⁴²Jalal ad-Din As-sayuthi, *al-Jami’ As-saghir*, Jus II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 24

dikenakan hukuman qishash. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Syaibah dan Ishak ibn Rahuwaih di dalam musnadnya dari Ibnu Abbas ra dengan lafaz:

العمد قود إلا أن يعفو بولي المقتول

Artinya:

Pembunuhan sengaja harus di qishash, kecuali apabila wali korban memberikan pengampunan.⁴³

Persyaratan kesengajaan ini disepakati oleh jumhur ulama, kecuali Imam Malik dan kelompoknya tidak mensyaratkan adanya niat (kesengajaan) membunuh untuk diterapkan hukuman, melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang dilarang.

- 3) Pelaku pembunuhan harus orang-orang yang mempunyai kebebasan. Syarat ini ditentukan oleh kelompok ulama Hanafiah, kecuali Imam Zufar. Tidak ada hukuman qishash bagi orang yang dipaksa melakukan pembunuhan. Menurut jumhur ulama termasuk Zufar, orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dikenakan qishash. Pandangan ulama Hanafiyah harus menjadi syarat agar pelaku dapat dipidana dengan pidana qishash, sebab orang yang dipaksa oleh orang lain melakukan pembunuhan menjadikan orang tersebut tidak memiliki kemauan bebas atau memiliki ikhtiar untuk melakukannya sendiri.

⁴³Wahbah al-Zauhili, *al-Fiqh Al-Islami wa 'Adillahtuhu*, Juz VI, h. 266

b. Syarat-syarat untuk korban

- 1) Korban harus orang yang *ma'sum ad-Dam*. Artinya korban adalah orang dijamin keselamatannya oleh negara Islam. Apabila korban kehilangan jaminan keselamatannya, misalnya karena ia murtad, pezina muhsan, atau pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenakan pidana qishash.

Jaminan keselamatan menurut syariat Islam dapat diperoleh dengan dua cara;

- a. Dengan iman (masuk Islam). Apabila seorang telah menyatakan diri masuk Islam ia dijamin keselamatannya (tidak boleh dibunuh atau dianiaya), ia harus dijamin hartanya dan hak-hak lainnya.
 - b. Dengan perjanjian keamanan. Sesuai dengan prinsip kebebasan beragama, seorang penduduk yang bertempat tinggal diwilayah Islam, tetapi mereka wajib untuk tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan yang berlaku, kecuali dibidang akidah.
- 2) Korban bukan bagian dari pelaku. Artinya antara keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak. Sebab ayah, ibu, kakek atau nenek tidak dapat di qishash karena membunuh anaknya atau cucunya. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmuzi, Ibnu Majah, dan Baihaqi dari Umar bin Khathab, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al Asyaji, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Al Hajjaj bin Arthan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Al khathab ia berkata: aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: "Seorang bapak tidak dijatuhi hukuman dengan membunuh anaknya."⁴⁴

- 3) Korban seimbang dengan pelaku. Prinsip keseimbangan yang dimaksud itu adalah keseimbangan antara Islam dan merdeka. Seorang muslim tidak dapat di qishash karena membunuh seorang kafir, demikian juga seorang merdeka tidak boleh di qishash karena ia membunuh seorang hamba.⁴⁵ Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi dan Abu Daud dari Amar Ibnu Syu'aib dari ayahnya yang berbunyi sebagai berikut:

حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس قال لا والله ما عندنا إلا ما عند الناس إلا أن يرزق الله رجلا فهما في القرآن أو ما في هذه الصحيفة فيها الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقتل مسلم بكافر

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Alqamah bin Amru Ad Darimi telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin ' ayyasy dari Mutharrif dari Asy Sya'bi dari Abu Juhainaf berkata; "Aku berkata kepada Ali bin Abu Thalib, apakah anda memiliki ilmu pengetahuanyang tidak dimiliki oleh masyarakat umum?" ia menjawab, "Tidak, demi Allah! Kami tidak memiliki ilmu pengetahuan apa-apa kecuali apa yang telah ada pada masyarakat, kecuali apabila Allah Subhanahu Wata'ala memberikan

⁴⁴Imam al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Jus IV, h. 18. Lihat juga, Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz I, h. 16

⁴⁵Abd. Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz II (Beirut: Muassah al-Risalah, 1987), h. 119

rezeki kepada seseorang berupa pemahaman mengenai al-Qur'an atau apa yang ada di dalam lembaran ini, dimana di dalamnya terdapat hukuman diat dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam dan seorang Muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang yang kafir.⁴⁶

Selain dari hadis tersebut, jumhur juga beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Baihaki dari Ibn Abbas, Rasulullah Saw bersabda:

أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدد جدعنا قال ثم نسي الحسن هذا الحديث وكان يقول لا يقتل حر بعد

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin ;Amir dari Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah Saw., beliau bersabda: "Barang siapa membunuh seorang budak, maka kami akan membunuhnya, dan barang siapa memotong hidungnya, maka kami akan memotong hidungnya." Perawi berkata: kemudian Al Hasan lupa hadis ini, dahulu ia mengatakan :” Orang yang merdeka tidak dibunuh lantaran (membunuh) seorang budak.”⁴⁷

Golongan Hanafiyah tidak menajadikan kesetaraan sebagai syarat, melainkan cukup dengan sifat kemanusiaan saja. Alasan golongan Hanafiyah adalah keumuman ayat al-Qur'an tentang qishash yang tidak membedakan anatara jiwa yang satu dengan jiwa yang lainnya. Dapat dilihat pada Qs al-Baqarah/2: 178, demikian juga Qs al-Maidah/5: 45, seperti yang dikutip sebelumnya.

⁴⁶Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa al-Tirmizi, *Jami' al-Kabir Sunan al-Tirmizi* Juz III (Beirut: Dar Al-Garb al-Islami, 1998), h. 77. Abu Abdillah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II (Cet, I, t.tp.: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M), h. 242. Abu Abdullah, Ibn Majah bin Muhammad bin Yazid al-Qajwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz II (Dar al-Ihya' al-Kitab al-Arabiyah, t.th), h. 887. Abu Daud al-Sijistan, Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abi Daud*, Juz II (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th), h. 89

⁴⁷Abdullah bin Abd Rahman bin al-Fadhal al-Tamimi, *Sunan al-Darimi*, Juz II (Bairut: Dar al-Fikir, t. Thm), h. 250

Lebih lanjut menurut Hanafiyah bisa di qishash karena membunuh kafir *zimmi* atau *mu'ahad*, karena setingkat, hal sama juga terhadap orang merdeka dapat di qishash karena membunuh hamba sahaya, sebab kafir, *zimmi* atau *mu'ahad*, merdeka dan hamba sahaya, juga manusia, yang memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya, hukuman qishash wajib dijatuhkan terhadap pelaku dalam dan dijamin keselamatannya.⁴⁸

E. Jenis-jenis Hukuman dalam Pasal 10 Ayat 1

Hukuman pokok telah ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP

1) Pidana Mati

⁴⁸Abd. Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jinai al-Islami*, Juz II, h. 121. Lihat juga Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III* (Jakarta: Pt. Kharism Ilmu, t.th), h. 278

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang di cantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 4), pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP.

2) Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam pasal 12 KUHP yang berbunyi:

- a) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu
- b) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut
- c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-berturut dalam hal yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana Mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampau karena pembarengan (*concursum*), pengulangan (*recidive*) atau karena yang telah di tentukan dalam pasal 52.
- d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3) Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari. Misalnya; tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi:

- a) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- b) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan pasal 52 a.

4) Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternative atau kumulatif. jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedangkan jumlah maksimum, tidak ada ketentuan mengenai hukuman denda diatur dalam pasal 30 KUHP, yang berbunyi:

- a) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- b) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.

- c) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan
- d) Dalam putusan hakim, lamanya itu di tetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah digantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisa yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
- e) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52 a.
- f) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan, pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya, baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya.

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini di atur dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi:

- a. Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya ialah
 - 1) Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
 - 2) Masuk balai tentara
 - 3) Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum;

- 4) Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampuan atau pengampuan pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
 - 5) Kekuasaan bapak, perwakilan dan pengampuan atas anaknya sendiri;
 - 6) Melakukan pekerjaan tertentu
- b. Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada di tunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

2. Perampasan barang-barang tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana , maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini di atur dalam pasal 39 KUHP yang berbunyi:

- a. Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
- b. Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- c. Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk pengumuman kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP)

Hukuman/pidana penjara (menurut pasal-pasal dalam KUHP dan UU No. 12/1995 tentang pemasyarakatan).

Pasal 12 KUHP berbunyi:

Hukuman penjara seumur hidup atau sementara pidana penjara dilakukan dalam jangka waktu tertentu (minimal satu hari , selama-lamanya lima belas tahun atau dapat dijatuhkan selama dua puluh tahun, tapi tidak boleh lebih dari dua puluh tahun). Pidana penjara dilakukan di penjara (prison/jail), di indonesia di sebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan (LP/lapas). Untuk pemulihan kembali hubungan antara narapidana dan masyarakat, penghuninya disebut narapidana/napu (inmates): Warga Binaan Pemasyarakatan (berdasrkan UU No. 12/1995).

Pembagian Sistem Penjara - gevangenisstelsel, menurut Utrecht:

Sistem pennsylvania, AS : para hukuman terus menerus ditutup sendiri-sendiri dalam kamar sel. Terhukum hanya melakukan kontak dengan penjaga sel/sipir penjara. Dilakukan peringatan: terhukum diperkenankan melakukan pekerjaan tangan dan secara terbatas dapat menerima tamu, tapi ia tetap dilarang bergaul dengan terhukum lain.

- a. Sistem Auburn, New York, AS, disebut juga sebagai silet system, dimana para hukuman pada siang hari disuruh bekerja bersama-sama tapi tidak boleh saling bicara, malam hari kembali ke sel.
- b. Sistem Irlandia (Irish system) yang berasal dari mark system, menggunakan penilaian. Para hukuman mula-mula ditempatkan dalam ruang tertutup terus menerus, dalam hal ini diterapkan hukum yang keras. Terhukum diberikan waktu untuk merenung, menyesali perbuatannya dan berharap ia dapat memperbaiki diri. Kalau dibiarkan bergaul dengan napi lain di khawatirkan bisa saja menjadi bertambah jahat. Jika berkelakuan baik, maka hukumannya diringankan : mulai di masyarakatkan dan dapat diberikan the rise of reformatory (pelepasan bersyarat), public work prison, dan ticket to leave. Kemudian diperkenankan kerja sama-sama, lalu secara bertahap diberi kelonggaran untuk bergaul satu sama lain. Pelepasan bersyarat dapat dilakukan jika telah menjalani dari $\frac{3}{4}$ hukumannya.
- c. Sistem Elmira (NY, AS) diperuntukan bagi terhukum yang berusia tidak lebih dari tiga puluh tahun. Disebut sebagai penjara reformatory yakni tempat untuk memperbaiki orang menjadi warga masyarakat yang berguna. Mirip dengan sistem Irlandia namun titik berat lebih pada usaha-usaha untuk memperbaiki si pelaku, jadi terpidana diberikan pengajaran, pendidikan dan pekerjaan yang nantinya bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.
- d. Sistem brostal (LONDON, UK). Dalam penerapannya ada ketentuan khusus dari menteri Kehakiman (Minister of justice). Khusus untuk pelaku yang masih muda yaitu mereka yang berusia kurang dari sembilan belas tahun. m seperti LP Pemuda dan LP Anak laki-laki di tanggerang, Banten.

Di indonesia diterapkan ke-5nya :

- 1) Beberapa hukuman dimasukkan dalam satu sel atau 1 orang/sel. Minimum security/maximum security/super maximum security (SMS)
 - 2) Napi pada umumnya boleh keluar dari sel pada pagi/atau siang hari, sore masuk sel sampai besok pagi. Ada jadwal kegiatannya.
 - 3) Jika melakukan pelanggaran berat atau berkelakuan tidak baik ataupun melanggar atauran makan dimasukkan dalam sel sendirian, disebut juga dengan tutupan sunyi.
 - 4) Boleh bekerja diluar sel secara bersama-sama = kerja di kebun/taman, masak di dapur, bersihkan kolam, kerja di bengkel LP untuk buat kerajinan/furniture, menjahit, menyukam, merangkai bunga dan sebagainya. Boleh belajar sekolah dalam LP, boleh membaca, dengar radio/nonton TV, olahraga dan sebagainya. Antara warga binaan boleh saling berinteraksi sesuai dengan jam yang telah ditentukan.
 - 5) Dapat diberikan pelepasan bersyarat PB- reclassering), jika telah menempuh 2/3 dari hukumannya (pasal 15KUHP), selain itu terdapat juga ketentuan tentang pidana percobaan seperti yang di atur dalam pasal 14a KUHP. Meskipun hukuman penjara dilakukan bersama-sama tapi tetap ada pemisahan mutlak:
 - a) Laki-laki dan perempuan
 - b) Orang dewasa dan anak dibawah umur
 - c) Orang yang dihukum/ditahan – orang yang dihukum karena upaya preventif
 - d) Orang militer dan orang sipil
1. Pidana kurungan

Dilaksanakan di penjara, tapi lebih bebas, ada hak pistole yaitu tersedia fasilitas yang lebih dari terpidana penjara

2. Pidana denda (pasal 30 ayat (1) KUHP dan UU No. 1/1960)

Dengan adanya pidana denda seringkali penerapan hukum pidana menjadi kabur karena pidana denda dianggap bukan pidana karena pelaku tadi ada di LP.

3. Pidana Tutupan (UU No.20/1946)

Pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan didasari oleh suatu motivasi yang patut dihormati/dihargai. Tempatnya di penjara, namun diberikan fasilitas yang baik karena terpidana boleh membawa dan menikmati buku bacaan dan radio/tape.⁴⁹

F. Pelanggaran dan kejahatan dalam hukum pidana (hukum positif).

Kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana (Hukum positif) istilah kejahatan berasal dari kata “jahat”, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan pada tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Dalam ketentuan pasal 86 KUHP sebagai berikut: “Apabila disebut kejahatan pada umumnya atau suatu kejahatan pada khususnya, maka dalam sebutan itu termasuk juga membantu melakukan itu, jika dikecualikan oleh suatu peraturan lain”. KUHP menempatkan kejahatan didalam buku kedua dan pelanggaran dibuku ketiga.

⁴⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tetapi tidak penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenai helm ketika mengendarai sepeda motor. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan. Pelanggaran adalah mengenai hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukum denda sedangkan Kejahatan adalah mengenai hal-hal besar yang diancam dengan pidana lainnya.

Terdapat dua cara pandang dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran (Moeljatno, 2002:72), yakni pandangan pertama yang melihat adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dari perbedaan kualitatif. Dalam pandangan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan adalah "*rechtsdeliten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetsdeliktern*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian (Moeljatno, 2002:71). Pandangan kedua yakni pandangan yang menyatakan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana) antara

kejahatan dan pelanggaran. Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan lebih berat daripada pelanggaran.

G. Jenis-jenis Pembinaan dalam Rumah Tahanan Negara

Pembinaan bertujuan agar Narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya tidak akan mengulangi perbuatannya (kejahatan) dan dapat hidup bermasyarakat secara wajar serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan. Oleh karena itu maka setiap Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan dibina dan dididik agar menyesali perbuatannya dan mengembangkannya menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta dibina dalam hal kemandirian sebagai bekal hidup dikemudian hari apabila sudah pulang dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan terdiri dari beberapa jenis yaitu Lembaga Pemasyarakatan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ketiga Lembaga Pemasyarakatan itu berbeda-beda baik kegiatan ataupun program yang ada. Berdasarkan Kepmen Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan ruang lingkup pembinaan itu antara lain Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni :

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Usaha ini dilaksanakan melalui P.4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

d. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka

kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

Menurut salah satu ahli hukum yaitu Saharjo, SH dalam di dalam bukunya *Pohon Beringin Pengayoma* menyatakan bahwa pidana penjara sebagai pidana pengekangan kebebasan kemerdekaan seharusnya adalah mengekang kemerdekaan Individu ditambah dengan memberi kesempatan bertobat kepada narapidana. Selain

itu Saharjo juga telah menetapkan konsop-konsep pokok konsepsi pemasyarakatan, yaitu :

- 1) Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat.
- 2) Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
- 3) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat daripada sebelum ia masuk penjara.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan negara sewaktu saja.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat.
- 9) Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan.
- 10) Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dari program pembinaan dan pembedaan lembaga-lembaga yang ada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan proses pemasyarakatan.

Berdasarkan pokok prinsip yang telah dikemukakan oleh Sahardjo, salah satu prinsip pokok dalam pembinaan narapidana adalah “Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan”. Untuk membuat seseorang tobat itu dapat dilakukan dengan melakukan bimbingan kepada narapidana dalam bidang agama, sehingga diharapkan apabila seorang narapidana telah selesai menjalani hukumannya maka narapidana tersebut tobat dan tidak melakukan perbuatan kejahatan lagi.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi yang digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.¹

B. *Lokasi Penelitian*

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Barru, dengan alasan banyaknya lahan tanah masyarakat yang dijadikan atau dipakai untuk pembangunan rel kereta api.

C. *Pendekatan Penelitian*

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dalam dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan dengan melihat serta mengaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari di dalam masyarakat.²

¹Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 60.

²Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk ilmu-ilmu sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 76.

D. Metode Pengumpulan Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang *mengajukan* pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi atau hasil wawancara terhadap pihak-pihak atau masyarakat yang diberikan atau mendapatkan ganti rugi terhadap pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru.

2. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersimpan berbentuk surat-surat. Sifat utama data ini tidak terbatas sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk melihat data yang terjadi beberapa waktu silam. Secara detail beberapa macam documenter terbagi beberapa surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping dan lain-lain. Dokumentasi dalam pengertian luas berupa setiap proses pembuktian yang di dasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.³

Pada metode ini peneliti akan mengambil dokumentasi lapangan yaitu tempat dimana dibangunnya rel kereta api di Kabupaten Barru.

³Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 186.

3. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan(reabilitasi) dan kesahihannya(validitasnya).

Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses-proses psikologis dan biologis. Dalam menggunakan teknik observasi, hal terpenting yang harus diperhatikan ialah mengendalikan pengamatan dan ingatan si peneliti.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri sehingga peneliti harus “divilasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi: pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya.

F. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka.⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 143.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu di Kabupaten Barru. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan masyarakat yang diberikan ganti rugi yang akan dibahas dilokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Bahan penelitian sekunder ini menghasilkan data sekunder yang diperoleh dari dua bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun badan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

1. Al-qur'anul karim
2. Al-hadits
3. Kitab undang-undang perdata

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a. Buku yang membahas tentang tanah atau agraria, pencabutan hak atas tanah dan ganti rugi.
- b. Artikel dan tulisan yang berkaitan dengan masalah tanah atau agraria, pencabutan hak atas tanah dan ganti rugi.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumen, yaitu mempelajari bahan-bahan yang berupa data sekunder. Pertama dengan

mempelajari aturan-aturan di bidang hukum yang menjadi objek penelitian, dipilih dan dihimpun kemudian dari bahan itu dipilih asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan ketentuan-ketentuan yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya disusun berdasarkan kerangka yang sistematis guna mempermudah dan menganalisisnya.

G. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵ Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

H. Pengujian Keabsahan Data

a. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam dengan cara sistematis.

⁵Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 46

b. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan Bahan Referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah di temukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara dan observasi yang telah ditemukan oleh peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Rumah Tahanan Negara Kls IIB Raba Bima

1. Sejarah dan Latar Belakang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima

a. Sejarah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima

Rumah tahanan negara klas IIB Raba Bima berdiri sejak tahun 1917 dimana letak geografisnya terletak di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah bagian timur pulau sumbawa tepatnya berada di kota administratif bima, dengan wilayah kerja mencakup kabupaten dan kota bima, dalam perjalanan sejarahnya selama lebih kurang 95 tahun, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima selalu berupaya untuk tetap konsisten dengan maksud awal pembentukannya yang antara lain sebagai tempat tersangka dan terdakwa selama menjalani proses penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dengan kata lain Rutan telah memfokuskan perlakuan dan pelayanan serta perawatan tahanan yang walaupun dalam pelaksanaannya juga memberikan pembinaan terhadap narapidana tertentu.¹

b. Latar Belakang Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI dibidang penempatan. Perawatan dan pelayanan tahanan. Ketentuan mengenai ORTA Rumah Tahanan

¹Dokumen Ruta Klas IIB Raba Bima

Negara diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 04.PR.07.03 tahun 1985 tentang ORTA kerja Rumah Tahanan Negara dan Rupbasan ketentuan mengenai RUTAN juga di atur dalam peraturan pemerintah RI Nomor. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah satu fungsi utama Rutan adalah: memberikan pelayanan Kepada Tahanan, didalamnya tecakup pula perawatan dan kesehatan tahanan. Pembinaan bantuan Hukum Penyuluhan Jasmani dan Rohani serta Pembinaan Bimbingan Kegiatan untuk Tahanan sesuai dengan apa yang menjadi TUPOSI dalam RUTAN.

c. Visi Misi

Adapun yang menjadi Visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima sebagai berikut :

- 1) Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan masyarakat sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan yang maha esa.
- 2) Masyarakat memperoleh kepastian hukum.

Adapun yang menjadi Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima sebagai berikut :

- a) Melaksanakan bimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- b) Melindungi Hak Asasi Manusia

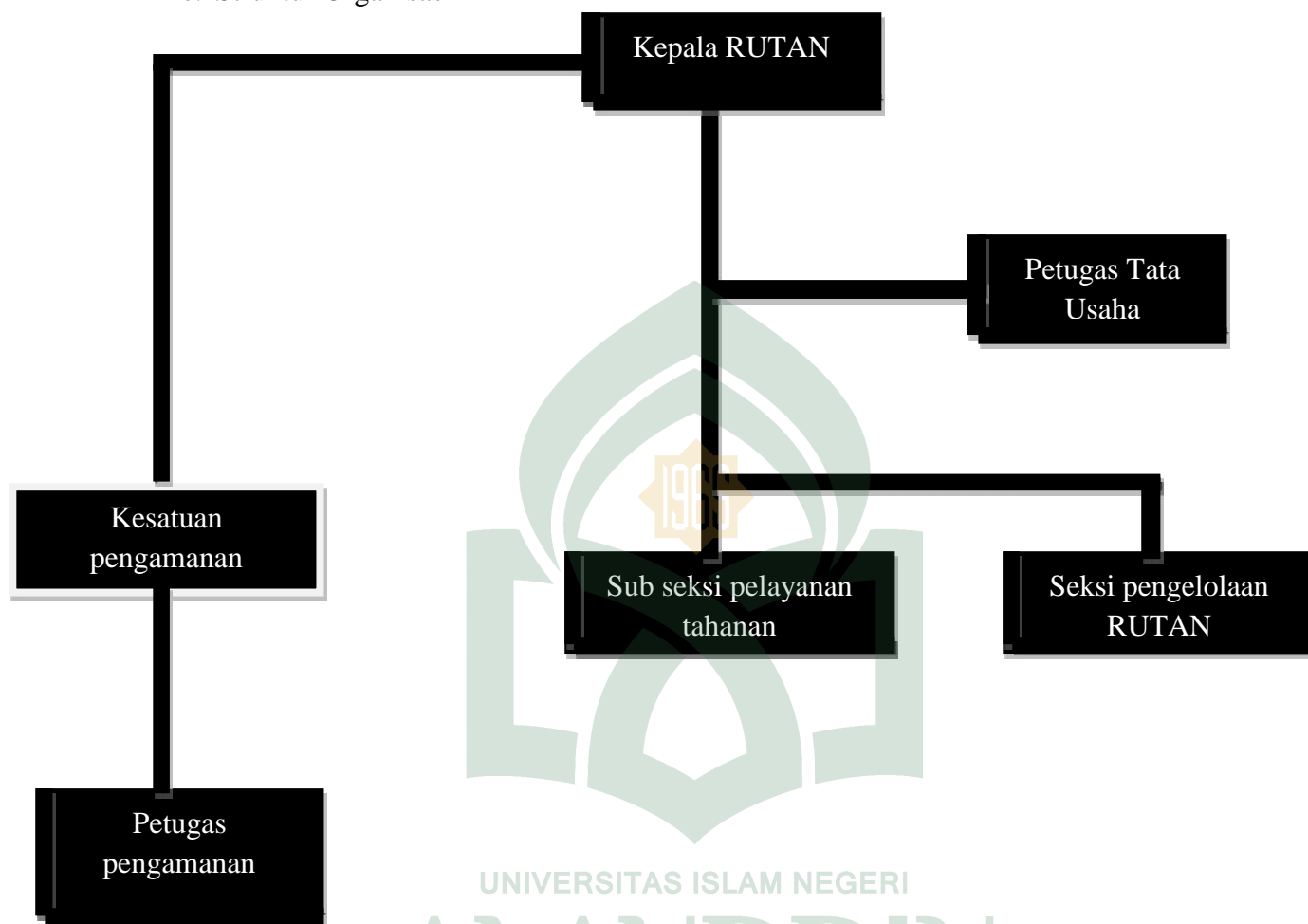
d. Motto

Rutan Raba Bima Berhiber

- 1) Bersih : kebersihan merupakan salah satu faktor penting dalam arti tidak hanya bersih lingkungannya saja, namun juga bersih dari segala perbuatan yang melanggar ketentuan di dalam RUTAN sesuai dengan peraturan yang berlaku, diharapkan dapat terwujudnya culture yang sehat, indah dan bersahaja baik bagi wbp maupun petugas.
- 2) Hijau : dengan lingkungan yang hijau tertata rapi serta petugas yang nampak rapi, dan berwibawa dengan performa maka akan terlihat lingkungan kerja yang sejuk dan indah. Yang diharapkan dapat memberikan motivasi bekerja dengan baik dan bertanggung jawab bagi petugas.
- 3) Beribadah : terlaksananya hubungan antara manusia dengan tuhan yang rutin dan berkesenambungan sehingga di harapkan adanya keseimbangan antara tertib lahiriah dengan tertib bathiniah yang diharapkan dapat mendasi dalam bekerja dunia berbasis akhirat².

²Dokumen Rutan Klas IIB Raba Bima

e. Struktur Organisasi



DATA KEPEGAWAIAN RUTAN RABA BIMA

Berdasarkan Penempatan Kerja

SUB. SEKSI	PRIA	WANITA	JUMLAH
PENGELOLAAN	9	3	12
PELAYANAN	8	3	11
KPR	43	1	44
JUMLAH	60	7	67

Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
S2	1	-	1
S1	14	2	16
D3	5	-	5
SLTA	45	2	47
JUMLAH	65	4	69

DATAPER 18 Januari 2017

BERDASARKAN KEPANGKATAN

GOLONGAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
III d	1	-	1
III c	5	2	7
III b	14	2	16
III a	15	1	16
II d	3	-	3
II c	4	1	5
II b	8	-	8
II a	12	1	13
JUMLAH	62	7	69

DATA PER 18 Januari 2017

Sumber data: Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima DATAPER 18 Januari 2017.

DATA WARGA BINAAN RUTAN RABA BIMA

NO.	REGISTER	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	AI	61	1	62
2	AII	35	1	36
3	AIII	91	5	96
4	AIV	3	2	5
5	AV			
JUMLAH		321	10	331

NO.	REGISTER	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	BI	36	1	37
2	BIla	15	-	15
3	BIlb	-	-	
4	BIII	4	-	4
JUMLAH		186	22	208

DATA PER 18 Januari 2017

Data Warga Binaan Rutan Raba Bima

No.	Jenis-jenis tindak pidana	Jumlah
1.	Pembakaran	1 orang
2.	Penganiayaan	10 orang
3.	Pembunuhan	25 orang
4.	Pencurian	70 orang
5.	Perampokan	6 orang
6.	Memeras	3 orang
7.	Kesusilaan	10 orang
8.	Penggelepan	22 orang
9.	Perjudian	49 orang
10.	Narkotika	50 orang
11.	Penipuan	14 orang
12.	Korupsi	2 orang
13.	Kenakalan	2 orang
14.	Dalam jabatan	3 orang
15.	Lain-lain/fidusia/KDRT	4 orang
16.	Terhadap ketertiban	6 orang

Sumber data: Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima DATAPER 16 Januari 2017

Data Warga Binaan Rutan Raba Bima yang sudah berkekuatan hukum tetap dan masih dalam tahap persidangan

Yang sudah berkekuatan hukum tetap	Masih dalam tahap persidangan
Dalam jabatan (2 orang)	Dalam jabatan (1 orang)
KDRT (4 orang)	Narkotika (18 orang)
Kenakalan (2 orang)	Pembunuhan (10 orang)
Kesusilaan (7 orang)	Kesusilaan (3 orang)
Ketertiban (6 orang)	Pencurian (20 orang)
Korupsi (2 orang)	Penganiayaan (2 orang)
Memeras (3 orang)	Penggelapan (12 orang)
Narkotika (32 orang)	Penipuan (8 orang)
Pembunuhan (15 orang)	Perjudian (30 orang)
Pencurian (50 orang)	
pembakaran (1 orang)	
Penggelapan (10 orang)	
Penipuan (6 orang)	
Perampokan (6 orang)	
Perjudian (19 orang)	
Penganiayaan (8 orang)	
Jumlah : 171 orang	Jumlah : 104 orang

Sumber data: Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima DATAPER 18 Januari 2017.

2. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dikenal dengan nama pemasyarakatan. Berhasilnya pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lapas/Rutan merupakan tujuan yang paling utama sebagai akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah setelah warga binaan pemasyarakatan mengikuti seluruh program pembinaan, diharapkan mereka akan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima pada dasarnya masih mengacu pada pembinaan narapidana pada umumnya dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, namun dengan begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh para narapidana maka dalam pembinaan narapidana hendaknya dilaksanakan lebih spesifik dan perlu kerja sama dengan pihak instansi yang terkait secara intensif dan komperhensif. Oleh karena itulah setiap 6 bulan sekali Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima melakukan rapat guna membahas perencanaan dan mengevaluasi pembinaan narapidana. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Ta'juddin (43 tahun/Ketua keamanan Rutan Klas IIB Raba Bima).

“Dibahas di rapat rutin 6 bulan sekali, jika dalam pelaksanaannya ada yang perlu diperbaiki dibahas oleh seksi yang bersangkutan sepengetahuan Kepala Rutan,

hal ini dilakukan agar pembinaan benar-benar bermanfaat bagi narapidana dan dapat merubah perilaku narapidana lebih baik³

Sistem pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima disesuaikan dengan proses dan tahap pembinaan yang telah direncanakan. Adapun tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, narapidana diwajibkan untuk mengikuti program-program pembinaan yang telah ditetapkan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima sejak mereka masuk sampai bebas dari Rumah Tahanan Negara karena habis masa pidananya.

Pembinaan narapida di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Manepaling

Manepaling adalah singkatan dari masa pengenalan lingkungan. Masa manepaling adalah masa awal yang harus dijalani oleh narapidana setelah mereka masuk ke Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima, narapidana menjalani program ini selama 30 hari. Pada masa manepaling narapidana akan mendapatkan pembekalan tentang kehidupan di Rutan yang mencakup: pelatihan baris-berbaris,

³Taju'ddin (43 tahun), Ketua Keamanan Rutan Klas IIB Raba Bima, *Wawancara*, Bima, 10 April 2017

tata tertib dan peraturan, hak, kewajiban dan larangan, sosialisasi program pembinaan, sosialisasi lingkungan dan blok hunian dan berbagai kegiatan lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Kuswadi (61 tahun/pencurian):

”pada saat pertama kali datang kesini, saya didata dan diageledah dulu baik badan dan barang yang saya bawa oleh petugas Rutan, diberitahu hak dan kewajiban di Rutan, di beritahu kegiatan yang akan dilaksanakan, sosialisasi lingkungan, dan setiap pagi diajari baris-berbaris di lapangan oleh petugas Rutan selama 1 bulan.⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa saat narapidana masuk ke Rutan mereka didata dan diageledah baik badan maupun barang-barang bawaannya, kemudian mengikuti kegiatan seperti baris-berbaris ini bertujuan melatih kedisiplinan narapidana, pengenalan lingkungan ini bertujuan agar narapidana dapat beradaptasi dengan lingkungan di Rutan, sosialisasi program pembinaan ini bertujuan agar narapidana paham dengan program kegiatan apa saja yang diberikan selama mereka menjalani masa pidana.

b. Pembinaan Intelektual dan Wawasan Kebangsaan

Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyelenggaraan taman bacaan, penyuluhan hukum, dan berbagai kegiatan penyuluhan lainnya.

⁴Kuswadi (61 tahun), Narapidana, *Wawancara*, Bima, 11 April 2017

Pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk membina kesadaran berbangsa dan bernegara narapidana, agar menjadi warga negara yang baik, yang berbakti bagi bangsa dan negaranya, serta melatih kesadarannya dan wawasan narapidana, program ini dijalani oleh narapidana setelah narapidana menjalani program manepaling atau setelah narapidana menjalani 1/3-1/2 masa pidana, yang dimaksud untuk membina mental dan rasa kecintaan terhadap tanah air dan NKRI. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan melaksanakan upacara hari-hari besar nasional. Seperi yang diungkapkan oleh Ahmad Arif (17 tahun/kesusilaan):

“saya dikumpulkan dengan yang lain diruang kelas, seminggu 2 kali yaitu hari senin dan kamis, diberi pelajaran tentang pancasila dan kewarganegaraan dan hukum oleh petugas Rutan, kadang ada juga dari petugas lain seperti DIKNAS dan juga mengikuti upacara bersama dilapangan pada hari-hari besar Nasional.⁵

c. Pembinaan mental rohani

Pembinaan kerohanian bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Esa, sehingga narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan yang salah, pembinaan ini diikuti oleh narapidana yang telah menjalani 1/3-1/2 masa pidana atau pada pembinaan tahap I. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin, rabu dan sabtu pukul 09:00 WIB, untuk yang beragama Islam, sedangkan untuk yang beragama kristen diadakan setiap hari selasa dan kamis. Pembinaan ini berupa kegiatan kerohanian Islam yang berupa pengajian rutin, dzikir bersama, sholat berjama'ah, pendalaman agama, untuk

⁵Ahmad Arif (17 tahun), Narapidana, *Wawancara* , Bima, 12 April 2017

kegiatan agama lain ada kegiatan gereja secara rutin, serta kegiatan-kegiatan hari-hari besar keagamaan. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Amin (28 tahun/Narkotika):

“Yang beragama Islam seminggu 3 kali yaitu hari senin, rabu dan sabtu, yang beragama lain seminggu 2 kali yaitu hari selasa dan kamis, yang beragama Islam ada kegiatan pengajian, dzikir bersama, sholat berjamaah, pendalaman agama, untuk yang agama lain seperti kegiatan Gereja serta kegiatan-kegiatan hari-hari besar keagamaan, petugas yang membina dari petugas Rutan dan juga dari luar seperti Ustad atau Kiyai dan dari Departemen Agama.⁶

Adapun pembelajaran yang diberikan oleh narapidana yang beragama Islam agar diberikan ceramah mengenai ketakutan kepada Allah diberikan siraman rohani agar rasa takut untuk membuat tindak kejahatan bukan hanya sekedar takut akan dipenjara akan tetapi takut kepada Allah atas segala yang ia perbuat sebagai contoh narapidana melakukan pembunuhan, maka dia diberikan siraman rohani/ceramah bahwa sanya didunia yang melakukan pembunuhan maka azab Allah diakhirat akan diberikan kepadanya maka tempatnya dineraka jahannam kekal abadi kecuali bagi orang-orang yang momohon ampunan dan tidak melakukan lagi hal seperti itu. Sebagaimana Qs. An-Nisa: 93:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ

⁶Abdul Amin (28 tahun), Narapidana, Wawancara, Bima, 12 April 2017

قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Terjemahnya :

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah[336]. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.⁷

Dari ayat di atas syait utsaimin menyimpulkan bahwa ada 5 ancaman atau bentuk hukuman yang allah siapakan bagi siapa saja yang mmbunuh seorang mukmin tanpa berdosa :

1. Ditempatkan didalam neraka jahannam selam-lamnya
2. Allah mumurkainya
3. Allah melaknaknya

⁷Kementrian Agama Refublik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 122.

4. Dipersiapkan siksa yang pedih bagi orang yang sengaja membunuh orang beriman, karena dia telah munumpahkan darah yang haram
5. Dijadikan agama terasa sempit baginya dan dadahnya pun menjadi sesak, hingga ia terpisah dari agamanya secara sempurna dan termasuk penguni neraka yang kekal di dalamnya.

Dari Azab Allah swt di atas maka dari itu narapidana harus diberikan siraman rohani/ceramah bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang melakukan pembunuhan, bukan hanya pembunuhan semua tindak kejahatan dihadapan Allah sangat dibenci, maka dari itu narapidana harus takut kepada Allah swt. Supaya ia berpikir dalam berbuat tindak kejahatan.

d. Pembinaan jasmani (olahraga)

Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh para narapidana, pembinaan ini dilaksanakan pada tahap pembinaan I. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: senam pagi, bulutangkis Seperti yang diungkap oleh Nurcholis (33 tahun/penipuan)

“pembinaan jasmani atau olahraga , ada senam pagi setiap hari sabtu pukul 07:30-08:30 senam pagi ini wajib diikuti oleh semua narapidana, untuk olahraga pilihan ada setiap hari selasa dan rabu pukul 15:00-17:00 bulu tangkis setiap hari Kamis dan Jum’at pukul 15:00-17:00, kadang petugas Rutan ikut juga bermain bersama-sama.⁸

⁸Nurcholis (33 tahun), Narapidana, Wawancara, Bima, 13 April 2017

e. *Criminion*

Criminion adalah pembinaan yang diberikan kepada narapidana untuk bagaimana cara berkomunikasi kepada orang lain, tentang bagaimana melatih mental dan cara bersikap. Seperti yang diungkapkan oleh Mifthakul Ni'am (34 tahun/pembunuhan):

“Kegiatan *Criminion* dilaksanakan sebulan sekali, kami semua dikumpulkan menjadi satu, kemudian diberi materi tentang bagaimana cara berbicara yang sopan, bersikap dan berperilaku yang baik, yang memberi materi biasanya dari luar seperti tokoh masyarakat atau pegawai pemerintahan.⁹

f. Asimilasi (pembauran dengan masyarakat)

Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana dapat mudah diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya, namun tidak semua narapida dapat mengikuti kegiatan ini, hanya narapidana yang mempunyai perilaku baik dan telah menjalani ½-2/3 masa pidana. Seperti yang di ungkapkan oleh Ahmad Adam (40 Tahun/pemerasan):

“Untuk kegiatan asimilasi , diberitahu dulu jadwalnya oleh petugas beberapa hari sebelum pelaksanaannya, biasanya hanya narapidana tertentu saja yang bisa mengikutinya. Yaitu narapidana yang memiliki perilaku baik, kegiatannya yaitu kerja

⁹Mifthakul Ni'am (34 tahun), Narapidana, Wawancara, Bima, 13 April 2017

bakti diluar Rutan, olahraga diluar Rutan dan ibadah diluar Rutan, dikawal oleh polisi dan petugas Rutan.¹⁰

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan asimilasi meliputi kerja bakti diluar Rutan, beribadah diluar Rutan dan berolahraga diluar Rutan. Kegiatan ini bertujuan agar narapidana dapat berinteraksi dengan masyarakat karena bagaimanapun juga narapidana adalah manusia jadi tidak boleh diasingkan dari kehidupan masyarakat.

Untuk pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima memiliki program kerja yaitu:

1) Pembinaan Kerja

Pembinaan ini bertujuan untuk memberi keterampilan kepada narapidana agar jika mereka bebas nanti bisa dijadikan mata pencaharian, pembinaan ini dilaksanakan pada tahap I pembinaan atau setelah narapidana menjalani 1/3-1/2 masa pidana, kegiatan yang dilaksanakan berupa pertanian, tukang kayu, montir. Seperti yang diungkapkan oleh Sumadi (25 Tahun/perampokan):

“Untuk pembinaan kerja ada kegiatan perbengkelan dan pertukangan, dalam kegiatan ini diajari serta disutuh praktek cara memperbaiki mesin dan memnbuat meja oleh petugas Rutan , ada juga narapidana yang sudah bisa diminta untuk membantu mengajari yang lain, kegiatan ini dilaksanakan seminggu 2 kali yaitu pada hari rabu dan jum’at.¹¹

¹⁰Ahmad Adam (40 tahun), Narapidana, wawancara, Bima, 14 April 2017

¹¹Sumadi (25 Tahun), narapidana ,Wawancara, Bima, 18 April 2017

2) Pembinaan Kesadaran Hukum

Sejak warga binaan melakukan tindak pidana, mereka sudah dianggap tidak sadar hukum atau peraturan yang berlaku, maka ketika mereka ditempatkan di dalam Rutan, sangat diharapkan warga binaan pemasyarakatan mampu menyadari akan hukum yang berlaku atau setidaknya menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Pembinaan kesadaran hukum kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima adalah kewajiban seluruh warga binaan pemasyarakatan tidak terkecuali menaati dan mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima.

Kewajiban warga binaan pemasyarakatan selain menaati dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Rutan Klas IIB Raba Bima adalah sebagai berikut:

- a) Taat menjalankan ibadah sesuai agama dengan kepercayaan masing-masing serta memelihara kerukunan beragama di lingkungan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima
- b) Mengikuti seluruh kegiatan yang telah diprogramkan
- c) Patuh, taat, dan hormat kepada seluruh petugas
- d) Memelihara kerapian dalam berpakaian sesuai dengan norma kesopanan
- e) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian

3. *Hambatan Dalam Pembinaan Narapidana*

Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai institusi yang menampung dan melakukan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan (narapidana) hendaknya harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembinaan

atau pemasyarakatan itu sendiri. Tersedianya fasilitas yang memadai di dalam Rumah Tahanan Negara menjadi faktor yang sangat penting dalam menjalankan fungsi Rumah Tahanan Negara sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana, secara umum jumlah penghuni di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia telah melebihi daya tampung yang semestinya (*over kapasitas*).

Secara umum, Rumah Tahanan Negara mengalami beberapa faktor yang dapat menghambat proses pembinaan, selain tidak seimbangnya penghuni terhadap Rumah Tahanan Negara, keadaan minimnya dana untuk kesehatan juga dijumpai di beberapa Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan ditubuh Rumah Tahanan Negara tidak dapat teratasi dengan mudah mengingat minimnya dana untuk membuat Rutan dan Lapas yang baru dan terbatasnya lahan yang bisa digunakan membuat Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan baru.

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima yang dipilih sebagai tempat penelitian merupakan salah satu Rutan yang mengalami keadaan *over kapasitas* hingga saat ini dan mengalami beberapa faktor penghambat proses pembinaan bagi narapidana. Permasalahan *over kapasitas* menjadi sulit diatasi mengingat tingginya tingkat kriminalitas dan keterbatasan dana untuk membuat Rutan dan Lapas yang baru, mengingat Lembaga Pemasyarakatan di Mataram yang mengalami *over kapasitas* maka pembinaan narapidana dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan bukanlah suatu hal yang mudah dan merupakan tantangan dari waktu ke waktu bagi setiap Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara

(Rutan) adalah instansi yang sangat berperan penting dalam memasyarakatkan para narapidana sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia.

Faktor-faktor penghambat lainnya di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima yaitu:

- a. Keadaan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima yang mengalami over kapasitas (tidak memadai daya tampung Rumah Tahanan Negara dibandingkan jumlah warga binaan pemasyarakatan) Rumah Tahanan Negara memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 150 orang sedangkan jumlah Warga Binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima hingga saat ini 277 orang.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembinaan.
- c. Kurangnya tenaga pengajar pembinaan, hal ini berkaitan dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima.
- d. Hambatan yang lain yaitu masih kurangnya jumlah petugas Rutan jika dibandingkan dengan jumlah narapidana tak sebanding karena jumlah petugas Rutan Klas IIB Raba Bima hanya 43 orang sedangkan jumlah narapidana hingga april 2017 sebanyak 277 orang. Jadi dibutuhkan petugas dari berbagai bidang yaitu psikologi, dokter umum, dan lain-lain . karena tidak mudah untuk mengatasi atau membimbing narapidana yang jumlahnya begitu banyak dan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Seperti yang diungkapkan oleh Anwar (43 Tahun/satuan keamanan).

“jumlah personil petugas yang masih kurang, khususnya dipos penjagaan setiap pos itu idealnya 3 orang ini hanya 2 orang, bagian lain juga kekurangan seperti tenaga kesehatan untuk merawat narapidana ketika sakit.”¹²



¹²Anwar (42 tahun) , Kesatuan Keamanan Rutan Klas IIB Raba Bima , *Wawancara*, Bima, 19 April 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa kondisi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pembinaan, keadaan Rutan yang mengalami over kapasitas, kurangnya petugas Rutan dibidang pembinaan serta tenaga pengajar program pembinaan keterampilan, sehingga sistem pemasyarakatan tidak berjalan baik di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima.
2. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang muncul selama pembinaan narapidana memiliki banyak masalah karena sumber daya manusia yang tidak memenuhi kekurangan peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena dari semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertib keadaan didalam penjara. Bukan hanya persoalan di sumber daya manusia, danapun menjadi faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan narapidana adapun hal yang paling penting dalam hambatan pembinaan narapidana adalah kurangnya jumlah petugas Rutan jika dibandingkan dengan jumlah narapidana tak sebanding

karena jumlah petugas Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima hanya 43 orang sedangkan jumlah narapidana hingga april 2017 sebanyak 208 orang.

3. *Saran*

1. Agar pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Neagara Klas IIB Raba Bima dapat berjalan dengan maksimal perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai, untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, maka upaya dapat dilakukan terhadap pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima yaitu: penambahan tenaga pengajar program pembinaan keterampilan, sosialisasi kepada masyarakat agar dapat merubah sigma terhadap warga binaan pemasyarakatan, sehingga mantan narapidana dapat diterima kembali di masyarakat.
2. Diharapkan agar selama pembinaan narapidana tercukupi sumber daya manusia, memenuhi segala kekurangan peralatan dan fasilitas dan memperbaiki segala peralatan yang rusak agar pelaksanaan pembinaan bisa berjalan dengan lancar. Sumbangan dana dari pemerintah juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, dan juga menambahkan jumlah anggota petugas Rutan agar sebanding dengan jumlah narapidana yang ada.

DAFTAR INFORMAN

Adam, Ahmad, Narapidana, *Wawancara*, 2017

Amin, Abdul, Narapidana, *Wawancara*, 2017

Anwar , kesatuan keamanan Rutan Klas IIB Raba Bima , *Wawancara*, 2017.

Arif, Ahmad, Narapidana, *Wawancara*, 2017.

Kuswadi (61 tahun), Narapidana, *Wawancara*, 2017.

Ni'am, Mifthakul, Narapidana, *Wawancara*, 2017.

Nurcholis, Narapidana, *Wawancara*, 2017

Sumadi (25 Tahun), Narapidana ,*Wawancara*, 2017.

Taju'ddin (43 tahun), Ketua Keamanan Rutan Klas IIB Raba Bima, *Wawancara*, 2017.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Mangundharjana. *Pengembangan : Arti Dan Metodenya*. Yogyakarta, 2001
- Abd Rahman Abdullah bin bin al-Fadh al-Tamimi, *Sunan al-Darimi*, Juz II Bairut: Dar al-Fikir, t. Thm
Alfabeta. 2009
- Ali, Zainuddin *Hukum Pidana Islam*, jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Al-Jalil Al-Hafiz Al-imam Imaduddin Abu Fida' Ismail Ibn Katsir, *al-Qur'an al-Adzim* t.tp.: Dar Ilya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.
- al-Tirmizi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa. *Jami' al-Kabir Sunan al-Tirmizi* Juz III Beirut: Dar Al-Garb al-Islami, 1998. Abu Abdillah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II Cet, I, t.tp.: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M. Abu Abdullah, Ibn Majah bin Muhammad bin Yazid al-Qajwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz II Dar al-Ihya' al-Kitab al-Arabiyyah, t.th. Abu Daud al-Sijistan, Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abi Daud*, Juz II t.tp.,: Dar al-Fikr, t.th
- al-Zauhili, Wahbah. *al-Fiqh Al-Islami wa 'Adillahtuhu*, Juz VI (Cet. III, Damsiq: Darul Fikr, 1989 M.
- al-Zuhaili, Wahbah *al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuhu*, Juz VI Damsyiq: Dar al-al-Fiqh, 1989
- Andrian, Nurmalia i95.blogspot.co.id/2014/09/ <http://sumber-sumber-hukum-pidana-islam.html>.
- Anis, Ibrahim dkk., *al-Mu'jam al Wasit*, Juz II,
- Anis, Ibrahim dkk., *Al-Mu'jam al-Wasit*, Juz II Mesir: Majma' al-Lugah al-Arabiyyah, 1972
- Ardy, "*Tujuan Hukum Pidana*" <https://tanahberu2.wordpress.com/2010/10/11/tujuan-hukum-pidana>, 2016.
- Aris, Irawan. "*Proposal Penelitian Efektifitas Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Biaro (studi Keberadaan Mantan Narapidana di Masyarakat)*", Blog Aris Irawan, <https://arisirawan.wordpress.com/2010/09/08/penelitian-tentang-pembinaan-narapidana>, 2016.
- As-sayuthi, Jalal ad-Din. *al-Jami' As-sagir*, Jus II Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

- Audah, Abd. Qadir. *al-Tasyri al-Jinai al-Islami*, Juz II. Lihat juga Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III* Jakarta: Pt. Kharism Ilmu, t.th
- Audah, Abd. Qadir. *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz II Beirut: Muassah al-Risalah, 1987
- Bambang, Daroese. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*.
- Daud Ali, H. Moh. *Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Rajawali Press, 1991
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Dokumen Ruta Klas IIB Raba Bima, 2017.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*,
- Haliman, Qajubi dalam *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Handayani, Sri Oktavia. “Pelaksanaan Pembinaan Nara Pidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Recidive Di Lapas Kelas II Asragen”, 2010.
- Haris, Hardiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk ulmu-ilmu sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'an Perkata dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah* Jakarta: Mghfirah Pustaka, 2009
- Hs, Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta. Djambatan. 1995.
- <http://andruhk.blogspot.co.id/2012/07/asas-asas-hukum-pidana.html>, 2016.
- <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-narapidana-dan-hak-hak.html>
- <http://info-peternakan.blogspot.co.id/2012/10/jenis-dan-fungsi-lembaga-kemasyarakatan.html>
- <http://konsultasi-hukum-online.com/2013/06/hadits-hadits-ahkam-tentang-jinayat/>
- <http://www.>
- <http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam>

<https://id.wikipedia.org/wiki/RumahTahananNegara>

<https://www.scribd.com/document/127260387/Pengertian-Hukum-Islam>

Imam al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Jus IV, h. 18. Lihat juga, Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz I, Jakarta. PT. Rineka Cipta, 2010.

Kementrian Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Cet. I: Bandung: PT. Syamil Qur'an, 2012

Keputusan Meneteri Hukum dan HAM No.M.07.03.10 Kualitatifdan R&D. Bandung.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04.10,Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, <http://www.Departemen Hukum dan Ham.co.id>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.

Lexy j, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja, 2009.

M Wiliam dan Kurtines. *Moralitas Perilaku Moral dan Perkembangan*

M, Sholehuddin M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali, 2003.

Madjri, Abdurrahman dan Fauzan al-Anshari, *Qishash Pembalasan yang Hak* Jakarta: Khairul Bayan, 2003

Maleong, lext j. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2007.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

Moral. Jakarta. UI Press. 1992

Muhammad al-Jurjani, Ali bin. *Kitab al-Ta'rifat* Jakarta: Dar al-Hikamh, t.th

Muladi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung. PT. Alumni.1986.

Nana, Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Rosda Karya,2016.

Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial* Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan

- Samin, Sabir. *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim* Jakarta: Kholam Publising, 2008
- Samin, Sabri. *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*,
- Shihab, M. Quraish .*Tafsir al-Misbah*, Vol. 3 Jakarta: Lentara Hati, 2002
- Sri handayani, Oktavia, *Pelaksanaan Pimbinan Narapidana dalam Rangka mencegah Pengulangan Tindak Pdana recidive* Sragen: Skripsi, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*,
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*.
- Sutrisno, Edy. “Mengintegrasikan Konsep Qishas-Diat ke dalam Pasal-pasal Pembunuhan dalam Hukum Pidana”, dalam <http://library.gunadarma.ac.id>. 12-11-2012
- Syariah Consulting Centre, “Hukum Pidana Islam Kejam, dalam www.syariahonline.com
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*.
- Yulia, Rena *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Cetakan pertama. yogyakarta: Graha Ilmu 2010
- Zein, Satria Efendi M. *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini, Mimbar Hukum, Nomor 20 Tahun VI* Jakarta: Al-Hikmah, 1995

L

A

M

P

I

R

A

N

-

L

A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN

M A P A S S A R

I

R

A

N

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi
Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Di Samata-Gowa

Assalamu Alaikum Wr Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dhita Mita Ningsih
Nim : 10500113231
Semester/Angk : VI (Genap) / 2013

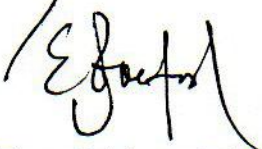
Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut:

1. Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Bola (Studi Kasus Di Wilayah Makassar)
2. Penegakkan Hukum Pidana Oleh Pengadilan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pemerkosaan (Study Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)
3. Pembinaan Narapidana di Lembaga Permasayarakatan Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Bima)


Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Mengetahui,
Penasehat Akademik

9 juni 2016
Pemohon,



(Eman Sulaiman, S.H, M.H)

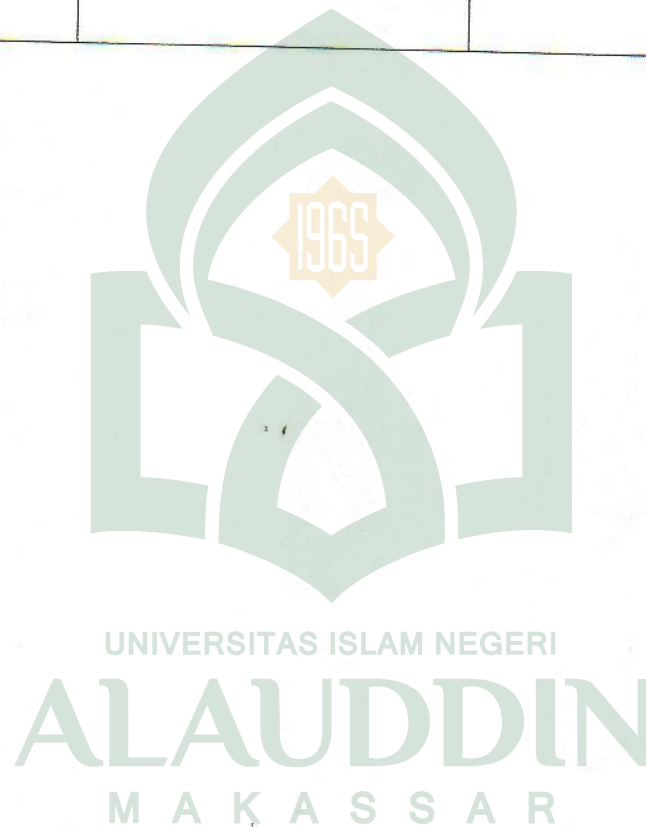
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
(Dhita Mita Ningsih)

23/6/16

RAHMAN SYAMSUDDIN
NIP 19821207 200901 1 010

PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING

JUDUL SKRIPSI/MASALAH	HARI/TANGGAL	MENYETUJUI SEKERTARIS JURUSAN
RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana profil peraturan bagi kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian bola ? 2. Mengapa masyarakat (pencinta bola) melakukan perbuatan judi bola ? 3. Bagaimana mekanisme tindakan yang dilakukan kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian bola? JUDUL SKRIPSI 1. Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Bola (Studi Kasus Di Wilayah Makassar)		
RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan anak dibawah umur ? 2. Bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur? JUDUL SKRIPSI 1. Penegakkan Hukum Pidana Oleh Pengadilan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pemerkosaan (Study Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)		
RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana		

<p>2. Apakah hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana</p> <p>JUDUL SKRIPSI</p> <p>1. Pembinaan Narapidana di Lembaga Permasalahan Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Study Kasus Bima)</p>	<p>23/6/2016</p>	<p></p> <p>RAHMAN SYAMSUDDIN NIP 19821207 200901 1 010</p>
<p>PEMBIMBING</p>	<p>HARI/TANGGAL</p>	<p>MENYETUJUI KETUA JURUSAN</p>
<p>1</p> <p>2</p>		





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Sri Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Sri Alauddin No. 36 Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

Nomor : SI.3A/PP.00.91/2016
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi
An. Dhita Mita Ningsih / 10500113231

Kepada Yth;

1. Dr. Hamzah Hasan., M.HI Sebagai Pembimbing I.
2. Rahman Syamsuddin, SH., M.H. Sebagai Pembimbing II.

Di-
Samata

bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Draft Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Desember 2016
Waktu : 10.00 WITA - selesai
Tempat/Ruangan : Ruang Jurusan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Pembinaan Nurapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Guna Mencegah
Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Bima)"

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih

Samata, 09 Desember 2016



Rahman Syamsuddin, SH., M.H.
NIP. 19680120 199503 2 001

Catatan :

- SK Pembimbing Draft Skripsi terlampir
- Pembimbing diharapkan hadir

LEMBAR PENGESAHAN

DRAF SKRIPSI

"Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Guna mencegah Pengulangan Tindak Pidana (studi Kasus LAPAS BIMA)

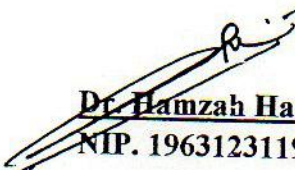
Disusun dan Diajukan Oleh

Dhita Mita Ningsih


Nim: 10500113231

Pada tanggal : 30 Maret 2017

Pembimbing I



Dr. Hamzah Hasan., M.HI
NIP. 196312311993021003

Pembimbing II


Rahman Syamsuddin.,SH.M.H
NIP.198212072009011010

Diketahui Oleh


Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Istiqamah, SH.,MH
NIP:19680120 1999503 2 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar




Prof.Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP:19621016 199003 1 003

Nomor : 1548 SI.1/PP.00.9/03/2017
Lamp : 1 (satu) exemplar
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata 30 Maret 2017

Kepada
Yth. **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB**

Di-
Mataram

Assalamu 'AlaikumWr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Dhita Mita Ningsih
N I M : 10500113231
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Samata ,Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana.Adapun Judul Skripsi yaitu :

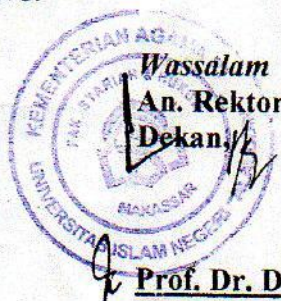
"Pembinaan Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana
(Studi Kasus RUTAN Kelas II.B Raba-Bima)

Dengan dosen pembimbing:

1. **Dr. Hamzah Hasan .,M.HI**
2. **Rahman Syamsuddin.,SH.M.H**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di **Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Raba-Bima** terhitung mulai tanggal 30 Maret 2017 – 30 april 2017

Demikian harapan kami dan terimakasih.
Wassalamu 'AlaikumWr.Wb.



Wassalam
An. Rektor
Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : W21.ERB.UM.01.01-296


Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Rumah Tahanan Negara Klas Iib Raba Bima dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dhita Mita Ningsih
Nomor Induk Mahasiswa : 10500113231
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Semester / T. A. : VIII (Delapan)
Judul Penelitian : Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana.

Mahasiswa tersebut diatas, telah melaksanakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas Iib Raba Bima pada tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan 30 April 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Raba Bima, 30 April 2017
Kepala Rumah Tahanan Negara
Klas Iib Raba Bima,

A. HALIK, S.Sos
NIP. 19671231 198903 1 005

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 871 Tahun 2017

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

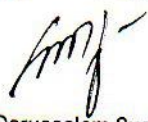
- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum tanggal 24 Mei 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**
- Pertama** : Menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kedua : Tugas Panitia mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Ketiga : Tugas Penguji melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Keempat : Tugas Panitia dan Penguji dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 24 Mei 2017
Dekan


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa

10021010100003 1 003
 Prof. Dr. Darussalam Syaamsanudin, M.Ag
 Dekan
 Samarata, 24 Mei 2017

01	10200113135 Drita Mita Ningsih	Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	Dr. Rohmah, M.Ag	Dr. Hamzah Hassan, M.Hi	Dr. H. Abd. Halim Taji, M.Ag.
	05	03	04	02	06
NO	NAMANYIM	LEWAT PENGUNJUK			
		WAKILAH & NGUL FIKIH	WAKILAH	WAKILAH	KELUWASEKILANG BELAKANG

BANJIR, PENGUNJUK DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF
 TENTANG
 NOMOR 24 TAHUN 2017
 SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Tambaran:

DAFTAR NILAI

UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

SEMESTER 8 (.....) WISUDA PERIODE September

TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Nama : Dhita Mita NingsihNIM : 10500113231Jurusan : Ilmu HukumJudul Skripsi : Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Hegara
Klas IIB Paba Bima Guna Menegakkan Pengulangan
Tindak Pidana

NILAI MATA KULIAH				JUMLAH RATA-RATA
MKDU	MKDK	MKPP	KESELURUHAN	
(Dirasah Islamiyah)	(Fikih/Ushul Fikih)			
<u>4</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>3,12</u>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Samata, 18 Juli 2017

M A K A S S A R

Kasubag.

Akademik dan Kemahasiswaan



MUHAJIDAH, S.E

NIP : 19670309 199303 2 002

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 705 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Dhita Mita Ningsih
NIM : 10500113231
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Hari/Tanggal : Jum'at / 16 Juni 2017
Perihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. Hamsir, M.Hum
Penguji I : Prof. Dr. Ahmad Abubakar, M.Ag
Penguji II : Dr. Thahir Maloko, M.HI
: 1. Mujahidah, SE
: 2. Nurhayati Wahid

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 09 Juni 2017

Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa;

Nomor : SLI/PP.00.9/ 245/2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **UNDANGAN SEMINAR HASIL**

Samata, 09 Juni 2017

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (Ketua)
 2. Dr. Hamsir, M.Hum. (Sekretaris)
 3. Prof.Dr. Ahmad Abubakar, M.Ag. (Penguji I)
 4. Dr. Thahir Maloko, M.HI (Penguji II)
 5. Dr. Hamzah Hasan, M.HI (Pembimbing I)
 6. Rahman Syamsuddin, SH, MH.(Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

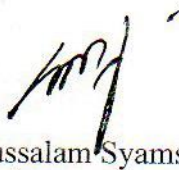
Nama : Dhita Mita Ningsih
N I M : 10500113231
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Juni 2017
Waktu : Pukul 15.00–16.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan IH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan


Prof.Dr.Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

RIWAYAT HIDUP



Dhita Mita Ningsih. lahir dari pasangan Gufran Abidin. dan Junari H. Ismail di Bima pada tanggal 10 Agustus 1996, anak pertama dari dua (2) bersaudara. Penulis memulai jenjang pendidikannya di SDN 22 Kota Bima, 2001 sampai 2007. Setelah lulus dari SDN 22 Kota Bima, penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 7 Kota Bima pada tahun 2008 sampai 2010, Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 2 Kota Bima hingga lulus di tahun 2013.

Pada tahun yang sama 2013, Penulis langsung melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan Jurusan Ilmu Hukum (S1) Fakultas Syari'ah & Hukum Dengan Melalui Jalur UMM Mandiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji penulisan skripsi saudara Dhita Mita Ningsih NIM: 10500113231 mahasiswa program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "**Pembinaan Narapidan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana**". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.


Dengan demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Kamis, 13 Juli 2017

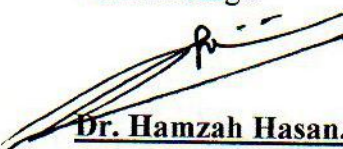
Penguji I


Prof. Dr. Achmad Abubakar, M. Ag
NIP: 1970070 199403 1 001

Penguji II


Dr. M. Thahir Maloko, M. Hi
NIP: 19631231 199503 1 006

Pembimbing I


Dr. Hamzah Hasan, M. HI
NIP: 19631231 1993302 1 003

pembimbing II


Rahman Syamsuddin, SH., MH
NIP: 19821122 200912 1 014

UNIVERSITAS
ALAUDDIN
MAKASSAR

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 36 Tahun 2017

TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Dhita Mita Ningsih
NIM : 10500113231
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2017
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Raha Bima Gana Mencegah Pengulangan Tindak Pidana"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H, M.H
Penguji I : Prof. Dr. Achmad Abubakar, M.Ag
Penguji II : Dr. M. Thahir Maloko, M.H.I
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditandatangani di
Samata tanggal

: Samata
: 21 Juli 2017



Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIM. 19621016 199003 1 003

Tembususan

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa;

Nomor : 2437 /SI.1/PP.00.9/ VII. /2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 21 Juli 2017

Kepada

Yth.

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Istiqamah, S.H, M.H. (Sekertaris)
3. Prof. Dr. Ahmad Abubakar, M.Ag. (Penguji I)
4. Dr. M. Thahir Maloko, M.H.I. (Penguji II)
5. Dr. Hamzah Hasan, M.H.I (Pembimbing I)
6. Rahman Syamsuddin, S.H, M.H. (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Dhita Mita Ningsih
N I M : 10500113231
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juli 2017
Buka Sidang : 08.30 WITA
Waktu : Pukul 09.00 – 10.00 WITA
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Wassalam
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003